

**IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DAERAH TERPENCIL**
Studi Kasus Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

NURJANNA
19.0401.0021

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DAERAH TERPENCIL**
Studi Kasus Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh:

NURJANNA
19.0401.0021

Pembimbing:

Zainuddin S, S.E., M.Ak.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurjanna
NIM : 19 0401 0021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis-Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan,







NURJANNA
NIM : 19 0401 0021

BALAMAN PENGESAHAN

Sebagai berwujud implementasi Sustainable Development Goals dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Terpencil Studi Kasus Desa Hayane Kecamatan Sekeloa Kabupaten Lingsar Utara yang ditulis oleh Nurjanna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1964010021, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunculkannya pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 Miladiyah ke-28 bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah dipertimbangkan sesuai esensi dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 13 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anisa Marwing, S.IE., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasih, S.E.I., M.F.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Abd. Kadir Adu, S.T., S.p., M.Si. | Penguji I | () |
| 4. Akbar Sabari, S.E.I., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Zainuddin S., S.E., M.Ak. | Pembimbing | () |

Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Anisa Marwing, S.IE., M.H.I.
NIP. 19820124 200901 3 006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Muhammad Alwi, S.Sy., M.F.I.
NIP. 198790715 201908 1 001

PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi *Sustainable Development Goals* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Terpenil Studi Kasus Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan para keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan doa dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta (almarhum) ayahanda Hamal dan

(almarhumah) ibunda Sarni, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga akhir hayat mereka, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudaraku Ansar, Abdul Jafar dan Zul Kifli, yang selama ini membantu, membiayai, dan mendoakanku hingga saat ini. Mudah-mudahan Allah SWT, mengumpulkan kita semua dalam surga-nya kelak. Serta saya mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag selaku Rektor IAIN Palopo dan Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag. Rektor IAIN Palopo priode 2019-2023 beserta wakil rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M. Pd Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, M. HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Fasiha, S. EI., M.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.AG., M.AG Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Muhammad Alwi,S.Sy.,M.EI. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.Sy., M.E selaku Sekertaris Prodi Ekonomi Syariah beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.

4. Zainuddin, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.
5. Abdul Kadir Arno SE, Sy., M.Si. selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu terkhusus seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan staf prodi Ekonomi Syari'ah yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini.
8. Dosen penguji utama, Abdul Kadir Arno SE, Sy., M.Si. dan Dosen penguji kedua yaitu Akbar Sabani, S.E.,M.E. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar serta saudara-saudari yang telah mendukung dan membantu penulis dalam proses penyelesaian studi.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas EKS E), yaitu Esse, Intan, Nurmiati, Astuti, dan Sunarti, yang selama ini membantu dan selalu

memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

11. Kepada teman KKN Posko Desa Cakkeawo yaitu Isna Mawar Sari, Sri Mimik Ahmad, Nur Azizah, penulis sangat berterima kasih dan juga kepada Muhammad Diaz, Nur Wahyuni, dan Sukma karena selama ini banyak membantu serta selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Terima kasih juga kepada saudariku Rosmidar, Astuti, Aisyah, Darni, Nirmala, Mulya, Hartati, Bulan, Nita, dan Aulia karena telah menjadi support sistem dan selalu menghibur penulis ketika jenuh dalam proses penyusunan skripsi.
13. Penulis berterima kasih banyak kepada aparat Desa Hoyane dan Masyarakat Desa Hoyane yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di Desa Hoyane. Serta pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu.
14. Kepada sepupu saya, Imran, Ikram, Mira, Risna, dan Linda yang membantu mendorong dan memberikan motivasi, dukungan, semangat serta kasih sayang sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keiklasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga skripsi ini bernilai ibadah, mempunyai kontribusi dan peranan yang besar bagi pihak yang membutuhkan dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 12 September 2023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ṣa ^ʿ	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye



ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha“	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya“	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (“).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي...	Fathah dan ya	Ai	adan u
اوي...	Fathah dan wau	Au	adan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4 Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
كَا	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وَا	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

:māta مَاتَ
:rāmā رَمَى
:qāla قِيلَ
:yamūtu يَمُوتُ

4. *Tāmarbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
أَلْمَدِينَةُ الْفَادِلَةِ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syadda*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّئْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُؤْمِنُ	: <i>nu"ima</i>
عُدُّوْا	: „ <i>aduwwun</i>

Jika huruf َ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

أَلِيٍّ	: „ <i>Alī</i> (bukan „ <i>Aliyy</i> atau <i>A"ly</i>)
عَرَبِيٍّ	: „ <i>Arabī</i> (bukan <i>A"rabiyy</i> atau „ <i>Arabiy</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma"rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسِ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةِ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةِ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادِ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:



: *ta'murūna*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtus*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri‘āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Dīnullahbill* بِسْمِ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā''marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi''a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan Syahru

Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

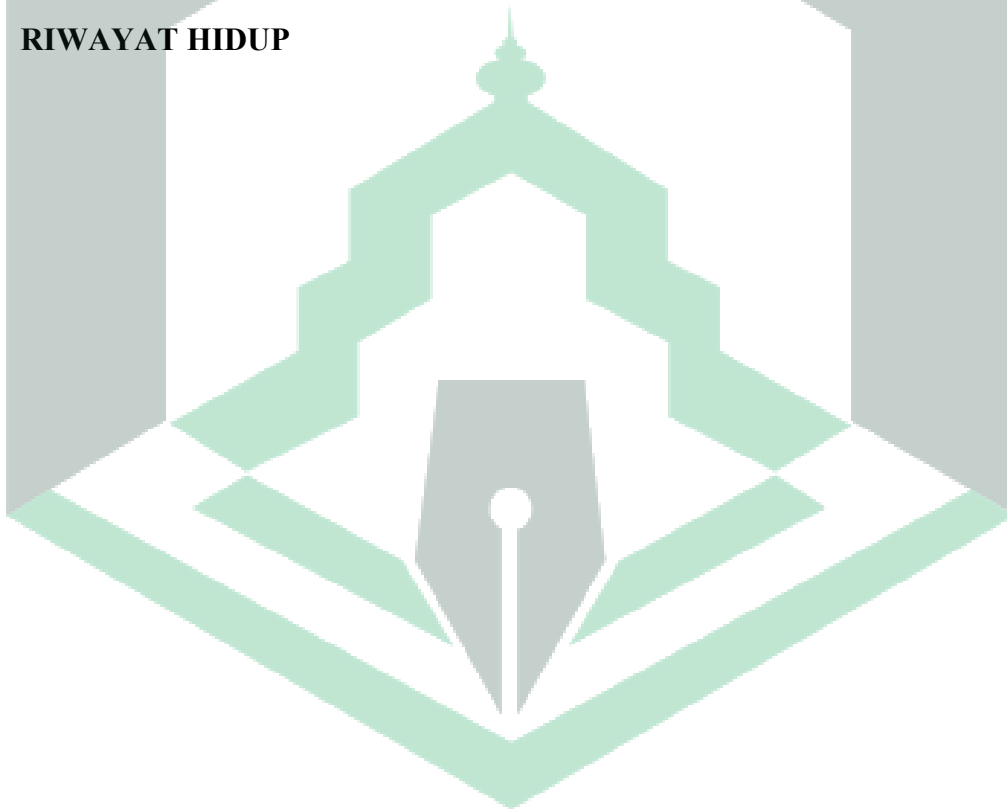
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta „ala
SAW .	= Sallallahu „Alaihi Wasallam
AS	= „Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali., Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SKRIPSI.....	i
PRAKATA.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
B. Deskripsi Teori.....	16
1. Implementasi.....	16
2. Sustainable Development Goals.....	17
3. Sustainable Development Goals (Desa).....	24
4. Kesejahteraan Masyarakat.....	26
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus dan Batasan Penelitian.....	35
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
D. Definisi Istilah.....	36
E. Sumber Data.....	37
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	39

H. Pemeriksaan Keabsahan Data	42
I. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian	47
B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan.....	83
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Al an'am/6:165	8
-------------------------------------	---



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	vi
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	viii
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	viii
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	ix
Tabel 1.1 Batas Wilayah	50
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk	51
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Desa	51
Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan	52
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	53
Tabel 1.6 Bentuk Program SDGs Desa.....	63
Tabel 1.7 SDGs dalam Mendukung Ekonomi dan Sosial.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 1.2 Peta Wilayah Desa Hoyane	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Halaman Persetujuan Tim Penguji

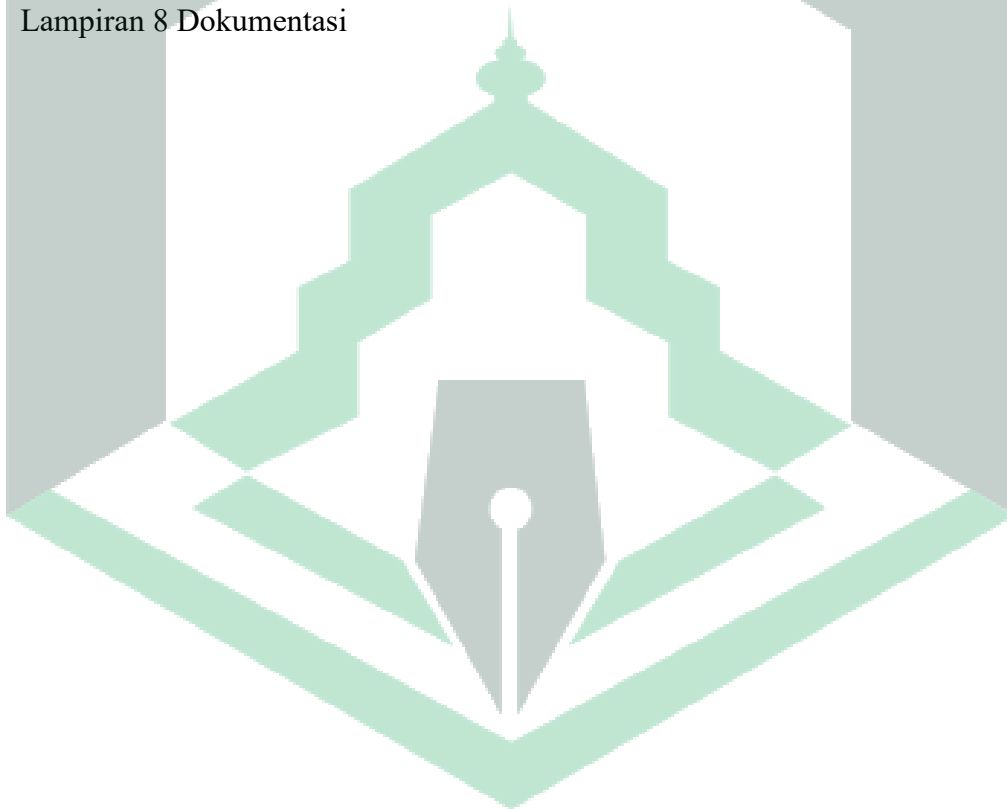
Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 7 Surat Keterangan Martikulasi

Lampiran 8 Dokumentasi



ABSTRAK

Nurjanna, 2023. *“Implementasi Sustainable Development Goals dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Terpencil Studi Kasus Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing Oleh Zainuddin S.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi *Sustainable Development Goals* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Terpencil Studi Kasus Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi program SDGs oleh pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan untuk mengetahui implementasi SDGs dalam mendukung pengembangan Ekonomi dan Sosial di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 1) bentuk implementasi program SDGs Desa Hoyane berupa BLT-DD, PKH, Bantuan Makanan Tambahan (Sembako), Perpipaian Air Bersih, Drainase, Bantuan Kesehatan, Bantuan Rabat di Dusun, dan Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Tujuan program SDGs adalah sebagai stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Hoyane. Namun pada dasarnya pembangunan yang di programkan belum memberikan dampak positif karena belum terealisasi. Adapun 2) implementasi SDGs di Desa Hoyane yang mendukung peningkatan Ekonomi dan Sosial. Masyarakat belum sepenuhnya memahami dan belum mengetahui program SDGs yang di programkan oleh pemerintah desa, seperti program pembangunan jalan dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sehingga infrastruktur tersebut masih sangat tertinggal jauh dan dapat dikatakan belum optimal.

Kata Kunci: SDGs, SDGs Desa, Bantuan, Kesejahteraan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bentuk mulai dari pembangunan maupun teknologi.¹ Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya alam yang besar dan melimpah yang tersebar diberbagai wilayah. Sumber daya alam yang ada meliputi pertanian, perkebunan, komoditas mineral tambang dan energi, perikanan serta kelautan.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan dengan skala global yang merupakan agenda Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang diusulkan oleh berbagai Negara pasal 25 September 2015 dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi dan menjamin kemakmuran bagi seluruh umat manusia. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan *Sustainable Development* (SDG) periode 2015-2030.²

SDGs (*Sustainable Development Goals*) didirikan sebagai tanggapan dari rasa tanggungjawab bersama untuk mewujudkan sebuah planet yang aman, adil,

¹ M. Abdurrahman, "Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqhi", 1 edition (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 130.

² Dwi Anggun Pangestu, "Analisis Faktor-faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Kemiskinan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Sumatera Selatan", (Skripsi, Universitas Brawijaya 2020), 2. <https://repository.unsri.ac.id/37088/3>

sejahtera dan berkelanjutan bagi semua umat manusia untuk memperjuangkan kehidupan di bumi, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sunitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.³ SDGs memiliki 3 pilar sebagai bagian implementasinya agar berhasil sebagai program yang dapat memberikan kesejahteraan dalam skala dunia yaitu: 1) pilar sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial; 2) pilar ekonomi, pembangunan ekonomi; dan 3) pilar lingkungan, termasuk keaneka ragaman hayati.⁴

Konsep dari pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya yang di miliki oleh manusia dalam melakukan perbaikan mutu kehidupan serta tidak melampaui batas ekosistem lingkungan yang mendukung kelangsungan kehidupannya. Pembangunan berkelanjutan bertujuan dalam upaya meningkatkan

³ Sdgs.bappenas.go.id

⁴ Murniningtyas, E., & Alisjahbana, A.S. (2018), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia; Vol. III (Issue 2), 1.

kesejahteraan pada masyarakat sebagai program dalam mengentaskan kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta aspirasinya (Surya 2019).⁵

Luwu Utara merupakan kabupaten dengan batas Seluampak Kecamatan Sabbang sampai dengan batas Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari 11 Kecamatan yaitu kecamatan sabbang, kecamatan baebunta, kecamatan limbong, kecamatan seko, kecamatan masamba, kecamatan rampi kecamatan malangke, kecamatan malangke barat, kecamatan mappedeceng, kecamatan sukamaju, kecamatan bone-bonedan kecamatan tanah lili.⁶

Kecamatan Seko adalah suatu dataran tinggi yang terletak kurang lebih 1200-1800 meter di atas permukaan laut di segitiga perbatasan antara Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Secara keseluruhan daerah ini memiliki luas wilayah 2.109,19 Km², merupakan kecamatan terluas dan terjauh dengan jarak sekitar 126 km dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan ini sudah berpenduduk sekitar 14.000 jiwa yang terdiri dari 12 desa yang semuanya sudah berstatus definitif, salah satunya desa hoyane. Kecamatan ini termasuk kecamatan yang kaya akan kekayaan alam namun infrastruktur jalan dengan kondisi berbatu, berlumpur, dan berlubang sehingga hanya kendaraan roda dua yang telah dimodifikasi bisa melintas jalur tersebut. Hal ini yang menjadi kendala utama pada masyarakat seko karena tidak dapat menunjang pertumbuhan

⁵ Suryanto Tulus., Khavid Normasyhuri and Riza Prayoga. "Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dengan Pendekatan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) : Tinjauan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi* 18, No. 2, (July, 2022): 173-185, <http://jurnal.stie-mandala.ac.id/index.php/relasi/article/download/589/544>.

⁶ Dinas Kominfo., Portal Resmi Kabupaten Luwu Utara, 2018. <https://portal.luwuutarakab.go.id/blog/page/sejarah>

ekonominya dengan baik dan hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam melakukan pembenahan infrastruktur.

Sarana transportasi untuk mencapai Seko dari kecamatan terdekat, Masamba, dapat dilakukan melalui jalur udara dengan pesawat perintis, atau jalur darat menggunakan ojek. Jalur darat yang dilalui ojek masih berupa jalan tanah yang memiliki banyak rintangan seperti lebar jalan yang sempit dan kondisi tanah basah sehingga cenderung sulit dilalui kendaraan biasa. Perjalanan menggunakan ojek dapat menghabiskan waktu 2-3 hari. Kesulitan untuk menuju Seko menyebabkan ongkos transportasi menggunakan ojek hampir mencapai Rp 1 juta per orang.

Desa Hoyane merupakan salah satu desa terpencil di Kecamatan Seko dimana infrastruktur jalan yang masih kurang terfokus sehingga hal tersebut menjadi kendala utama bagi masyarakat karena tidak dapat mengakses penghasilannya dengan baik. Permasalahan lain yang dihadapi masyarakat desa hoyane adalah minimnya infrastruktur desa seperti puskesmas, sekolah, air bersih dan kurangnya lapangan pekerjaan, dan terbatasnya sumber daya seperti hasil perkebunan coklat yang minimum apabila dijual di desa tidak memenuhi penjualan yang seharusnya mencapai 50% dari harga sesungguhnya, dilihat dari proses pengolahannya yang tidak mudah sehingga hal ini membuat para warga kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang tetap dan berkesinambungan serta produktivitas yang tidak banyak ditambah dengan kurangnya fasilitas kesehatan yang mengakibatkan desa tertinggal khususnya desa hoyane.

Menurut Hairuddin (Perangkat Desa Hoyane), Tingkat pendidikan di desa Hoyane masih tergolong rendah, rata-rata tingkat pendidikan akhir hanya sampai pada tingkat SMP dan SMA, sementara yang berpendidikan tinggi hanya sekitar 10% dari total penduduk desa hoyane, dan masih banyak yang berpendidikan akhir sekolah dasar (SD). Hal ini dikarenakan faktor perekonomian keluarga yang tidak mendukung dalam pendidikan sehingga kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan.

Sarana infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami pergeseran nilai dan budaya dalam mengelola dana desa sehingga terjadi pembangunan yang tidak efektif dengan berbagai alternative yang mengakibatkan turunnya pertumbuhan masyarakat. Maka tujuan program ini adalah untuk memprioritaskan penggunaan dana desa tahun 2022 agar dana desa tersebut dapat digunakan seefektif mungkin untuk mengidentifikasi potensi dalam mensejahterakan masyarakat desa.

Hadirnya SDGs desa adalah: (1) dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa, terutama pada golongan terbawah; dan (2) dampak pembangunan desa harus dirasakan melalui pembangunan desa yang lebih terfokus.⁷ Dalam pembangunan ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dengan tindakan yang menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup yang memaksimalkan konsep pemerintah dalam meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

⁷ Islam Faruk Zaini, "Kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Penanggulangan kemiskinan Masyarakat Desa," Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, (2021), 8. http://repository.unhas.ac.id/8979/2/E031171310_skripsi_01-10-2021%20Bab%201-2.pdf

Berkembangnya sarana infrastruktur yang dapat menjadi sarana dasar pelayanan dalam kegiatan pembangunan akan beresiko terhadap keadaan lingkungan sehingga menjadi perhatian khusus bagi masyarakat agar dapat melakukan perwujudan yang layak, produktif, dan berkelanjutan. Sebagaimana SDGs Desa memiliki 5 program yang sementara diterapkan oleh pemerintah Desa Hoyane yaitu: Program Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat Sejahtera, Pendidikan dan ekonomi, Infrastruktur Desa, dan Budaya desa Adaptif.

Kehadiran SDGs dimaksudkan guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat serta komponen utama dengan pengelolaan sumber daya alam untuk perkembangan ekonomi di masyarakat. Sebagaimana manfaat yang dirasakan oleh (Sukirman) penduduk desa hoyane setelah adanya program pembangunan jalan tani yaitu kemudahan dalam mengolah hasil pertaniannya karena dengan adanya jalan tani kendaraan yang digunakan mudah dalam proses pengangkutan hasil perkebunannya.

Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan efektif secara bersama melalui wadah atau lembaga kerjasama yang khusus dibentuk untuk menyelamatkan kelestarian alam yang dirancang untuk menjadi alam yang lebih produktif agar generasi yang akan datang dapat menikmatinya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan menginterpretasikan kebijakan yang ada sebagaimana islam mengajarkan syariat sebagai jalan untuk mencapai tujuan kesejahteraan dalam pembangunan berkelanjutan yang multidimensional pada bidang ekonomi, sehingga segala bentuk aktivitas pembangunan berorientasikan ajaran-ajaran agama seperti keadilan, dan melestarikan lingkungan. Dalam

pengelolaan sumber daya alam implementasi SDGs menjadi acuan untuk perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah secara berkesinambungan dengan mencerminkan pada norma budaya dan syariat islam.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupannya. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Dalam pandangan Islam, „sejahtera“ bukan berarti „yang kaya“ namun „yang ideal“ yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Semua hal yang diusahakan manusia, harus bertujuan untuk pemenuhan dua kebutuhan sentral itu agar terjadi keteraturan kehidupan personal sampai kepentingan lebih luas dalam bentuk kenegaraan. Islam menginginkan kesejahteraan terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini salah satu bentuk tugas pemerintah islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja Negara.⁸ Pemenuhan kebutuhan hidup terhadap masyarakat merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, dimana pemerintah memiliki peran besar dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Q.S Al-An'am, 6:165

⁸ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", Jakarta: Prenadamedia Group, (2016): 338, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=923783>



Terjemahan:

“Dialah (Allah) yang telah menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi ini dan Dia pula yang meninggikan sebagian kalian atas sebagian lainnya beberapa derajat.”(QS Al an’am, 6:165)⁹

Menurut Ibn Abi Rabi“, ayat di atas menegaskan bahwa Allah telah memberi keistimewaan kepada Raja dengan segala keutamaan dan memperkuat kedudukan mereka di bumi-Nya. Oleh sebab itu Allah mempercayakan kepada mereka untuk memimpin hamba-hamba-Nya yang lain.¹⁰ Oleh karena itu, penjelasan ayat di atas semakin mempertegas peran negara dalam mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya yaitu dalam Program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu, perlu mempertegas bagaimana pentingnya peran pemerintah/negara dalam mensejahterakan masyarakat.

Konsep mensejahterakan ini adalah dengan memberikan kelayakan hidup dan membantu perekonomian warga yang kurang mampu. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan oleh pemerintah harus direalisasikan dengan baik. Program ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola secara baik dengan mendistribusikannya kepada masyarakat

⁹ Kementerian Agama RI, “*al-Qur’an dan Terjemahan*”. Surah 6, Ayat 165.

¹⁰ Fadhil Sagala Mhd, “Peran Pemerintah dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Syariah,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, (2021): 11, <http://repository.uinsu.ac.id/11712/1/skripsi/pkh.mhd.fadhil.sagala.0203161040.pdf>.

secara merata. Namun, kenyataan dilapangan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini belum terealisasi dengan baik. Disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum merasakan kebermanfaatannya. Bahkan program ini juga masih kurang tepat sasaran. Peneliti merasa bahwa hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari program *sustainable development goals* (SDGs) itu sendiri.

Berbagai pandangan mengenai solusi pemulihan ekonomi terus berkembang dengan mempercepat agenda pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sebagaimana *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu program pembangunan yang berskala dunia yang sifatnya, tanpa membandingkan antara negara yang berkembang dengan negara yang maju. Hal ini sebagai wujud dari kepedulian bersama dalam membangun visi global bahwa pembangunan berkelanjutan adalah kewajiban bagi seluruh negara yang ada di dunia.¹¹

Program pemerintahan yang bersifat membangun dan juga berfokus dalam membangun masyarakat dengan cara melakukan penataan lingkungan dalam pengembangan spritual masyarakat agar dapat meningkatkan produktifitas dengan mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga mendapatkan kebijakan yang relatif agar tercipta kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan desa hoyane yang maju inovatif dan berkelanjutan di bidang pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Implementasi SDGs pada Desa Hoyane. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Implementasi *Sustainable Development Goals* dalam Meningkatkan**

¹¹ Michael Woodbridge, *From MDGs to SDGs: What are the Sustainable Development Goals?*, No. 01 (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development: Iclei Briefing Sheet, 2015), 1-2.

Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Terpencil: Studi Kasus Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Implementasi Program SDGs oleh Pemerintah Desa Hoyane dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Hayone Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Implementasi SDGs dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Sosial di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi program SDGs oleh pemerintah Desa Hoyane dalam mensejahterakan masyarakat.
2. Untuk mengetahui implementasi SDGs dalam mendukung pengembangan Ekonomi dan Sosial di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk bidang keilmuan khususnya ekonomi dan menjadi referensi rujukan untuk penelitian lanjutan mengenai Sustainable Development Goals dalam mensejahterakan masyarakat.

2. Manfaat praktis

a. Diharapkan dapat memberikan informasi yang konsumtif untuk dijadikan bahan masukan bagi seluruh pemerintah dan masyarakat desa dalam melaksanakan program SDGs.

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi masyarakat Desa Hoyane untuk mengetahui program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan pencarian dan hasil pengamatan sebagai bahan pendukung penelitian terdahulu, penulis mendapatkan beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini. Penelitian yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keterkaitan penelitian ini terhadap penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh kalangan akademis. Dengan tujuan untuk menjadikan perbandingan serta menghindari kesamaan objek dalam meneliti dan untuk menentukan letak perbedaan. Selain itu juga dimanfaatkan untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti mengenai implementasi *sustainable development goals* (SDGs) dalam mensejahterakan masyarakat. Maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan sebagai berikut:

Roberta Zulfhi Surya (2019) dengan judul “*Analisi Keselarasan SDGs Dengan Program Pembangunan Desa Seresam Di Desa seresam Kabupaten Indragiri Hulu*”. Tujuan penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan desk review. Langkah penelitian ini adalah: 1) Identifikasi desa berdasarkan data Indeks desa membangun; 2) Salidasi ke level Kabupaten; 3) Survei lapangan terkait program pembangunan desa; 4) Melakukan analisa keselarasan antara program pembangunan desa dengan SDGs. Dari analisa penelitian ini dapat disimpulkan bahwa desa seresam telah sukses mengimplementasikan tujuan mulia SDGs. Untuk lebih meningkatkan pencapaian SDGs, perlu dilakukan integrasi

dengan berbagai pihak melalui: 1. Anggaran CSR perusahaan turut berperan serta dalam kegiatan pembangunan desa (termasuk program desa SDGs) meskipun program CSR telah di atur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam program Pengabdian Masyarakat.¹²

Literatur yang telah dikemukakan dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu berfokus pada permasalahan. Maksudnya, fokus permasalahannya mengenai analisa keselarasan SDGs dengan program pembangunan desa seresam di desa seresam di kabupaten indragiri hulu dalam meningkatkan pencapaian SDGs. Sedangkan pada penelitian ini fokus permasalahannya membahas mengenai implementasi SDGs dalam mendukung pengembangan Ekonomi dan Sosial untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Rina Susanti (2020) dengan judul "*Peran Masyarakat dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih dan Sunitasi*". Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk peran masyarakat dalam upaya mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* Desa layak air bersih dan sunitasi. Guna mendekati masalah penelitian yang menggunakan tinjauan perspektif peran masyarakat dari Keith Davis. Data-data penelitian digunakan melalui dokumentasi dan pengisian kuesioner kepada 158 kepala keluarga masyarakat Desa Talontam dan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa bentuk peran atau

¹² Robertta Zulphisurya, "analisis keselarasan SDGs dengan program pembangunan desa Seresam di desa seresam di kabupaten indragiri hulu," *selodong mayang: jurnal ilmiah badan pembangunan perencanaan daerah di kabupaten indragiri hilir*, (20019), 79-84, <https://ojes.selodongmayang.com/indeks.php/babpeda/aticle/view/130>.

upaya masyarakat desa yang belum memiliki akses air bersih dan sanitasi layak untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* Desa nomor enam adalah berupa tenaga, pikiran, barang dan uang yang diwujudkan dengan tindakan menabung untuk membuat sumur bor dangkal, tempat mencuci tangan, septik tank tertutup dan sanitasi dan sesuai standar; membuat bak penampungan air hujan, membeli filter air; memindahkan lokasi septik tank; memanfaatkan barang bekas sebagai wadah cuci tangan; serta mengikuti penyuluhan kesehatan. Upaya kelompok masyarakat menjaga keberlanjutan akses air bersih dan sanitasi yang dimiliki adalah dengan tindakan penghematan penggunaan air bersih, pemeliharaan dan perawatan infrastruktur terbangun dan melindungi kawasan sungai.¹³

Literatur yang telah dikemukakan dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada fokus permasalahannya. Maksudnya, fokus permasalahannya membahas tentang menganalisis bentuk peran masyarakat dalam upaya mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* Desa layak air bersih dan sanitasi serta upaya kelompok masyarakat menjaga keberlanjutan akses air bersih. Sedangkan pada penelitian ini fokus permasalahannya membahas mengenai implementasi SDGs dalam mendukung pengembangan Ekonomi dan Sosial untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Islam Faruk Zaini (2021) dengan judul "*Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Penanggulangan kemiskinan Masyarakat*

¹³ Rina Susanti, "Peran Masyarakat dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih dan Sunitasi", *Journal of Education, Humaniora and Sosial Sciences (JEHSS)*, (2021): 1-5, <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/535>.

Desa". Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa. Dasar penelitian ini adalah studi kasus yang berguna untuk mengumpulkan dan menganalisa suatu proses tertentu terkait fokus penelitian, sehingga dapat menemukan suatu lingkup fenomena tertentu yang terbatas. Adapun hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa dalam penerapan *Sustainable Development Goals* Pemerintah Desa Wargajaya mengaplikasikan program turunan yang dicanangkan oleh Kemntrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu SDGs Desa dalam mengaplikasikannya ditujukan untuk melakukan pendataan terhadap para warga, perangkat desa (desa) dan rukun warga (RW). Hal itu ditunjukkan untuk mendapatkan gambaran yang konkret mengenai persoalan dan kehidupan masyarakat di desa Wargajaya. Tentu saja, terdapat program-program bantuan bagi masyarakat miskin di Desa Wargajaya berupa bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tujuannya adalah sebagai stimulus bagi masyarakat Desa Wargajaya yang berada dalam kategori masyarakat miskin. Masyarakat Desa Wargajaya tidak memahami program SDGs Desa itu, karena tidak terdapat sosialisasi terhadap masyarakat mengenai program SDGs Desa tentang tujuan dan manfaat SDGs Desa bagi masyarakat. Masyarakat lebih memahami dan mengetahui program-program konkret berupa bantuan-bantuan yang berbentuk uang dan sembako.¹⁴

¹⁴ Islam Faruk Zaini, "Kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa," *Journal of Sociology* 3, no.2, (2021): 1-2, <https://journal.unhas.aceh.id/index.php/HJS/article/view/1815>

Literatur yang dikemukakan dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada penerapan SDGs oleh pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi program SDGs oleh Pemerintah Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat.

B. Deskripsi Teori

1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman (2003) implementasi adalah suatu hal yang bermuara pada suatu aksi, kegiatan, tindakan serta adanya mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi juga tidak hanya pada kegiatan monoton saja, namun juga pada suatu kegiatan yang terencana dengan baik untuk dapat mencapai tujuan tertentu.¹⁵

Menurut Solichin Abdul Wahab (2008) implementasi adalah berbagai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan baik oleh para individu-individu, pejabat, atau kelompok pemerintah serta swasta yang diarahkan pada tercapainya suatu tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan dimana untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan jaringan pelaksana yang dapat dipercaya.

¹⁵ Nurdin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 30.

¹⁶ Abdul Wahab dan Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2008), 25.

2. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

a. Pengertian *Sustainable Development Goals*

SDGs merupakan singkatan dari *sustainable development goals* yang diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa kata “tujuan” memiliki arti yang dituju, maksud, tuntutan. Sedangkan kata “pembangunan” memiliki arti proses, cara, perbuatan membangun. Selanjutnya kata “berkelanjutan” memiliki arti berlangsung terus-menerus, berkesinambungan.¹⁷ Sehingga, SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai dengan proses yang terus-menerus dan berkelanjutan.

Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) didefinisikan sebagai *development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam *Our Common Future*, sebuah laporan dalam yang dipublikasikan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan *the world Commission on Environment and Development (WCED)* pada tahun 1987. Sejak kemunculannya, pembangunan berkelanjutan mempunyai banyak definisi dan konsep itupun menjadi cair. Meskipun demikian, beberapa hal prinsipil mendapatkan penekanan. Pertama, komitmen pada keadilan dan fairness, dimana prioritas selayaknya diberikan kepada masyarakat dunia yang paling miskin dan keputusan seharusnya mempertimbangkan hak-hak generasi

¹⁷ Pencarian - KBBI Daring, Diakses 4 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

yang akan datang. Kedua, sebagai suatu pandangan jauh ke depan (*long-term*) yang menekankan prinsip-prinsip *precautionary*, yaitu, dimana ada ancaman serius atau sesuatu yang tidak bisa dicegah, kekurangan kepastian pengetahuan secara penuh seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk menunda ukuran-ukuran biaya efektif (*cost-effective measures*) guna mencegah degradasi lingkungan. Ketiga, pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan, dan memahami, sekaligus bertindak dalam kesalinghubungan yang kompleks yang ada di antara lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial ini menjadi tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan.¹⁸

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) berawal dari disepakatinya dokumen *The Future We Want* dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012*. SDGs merupakan program keberlanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs).¹⁹

TPB atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah suatu agenda pembangunan global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta melindungi planet. Hal ini dapat dicapai dengan memenuhi 17 tujuan yang telah ditetapkan hingga tahun 2030.²⁰ SDGs merupakan suatu bentuk

¹⁸ Muhammad Fardan Ngoyo, "Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs) Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan", *Sosioreligius* 1, no. 1 (juni 2015), 81.

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/4525>

¹⁹ Nurmasari Situmeang dan Sindy Yulia Putri, "Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Pada Kasus Stunting di Indonesia", *Jurnal PIR* 5, no.2 (Februari 2021), 166.

<http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/PIR/article/view/1084/1546>

²⁰ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Jakarta, 2022), 2.

pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, serta menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, TPB juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan tata kelola yang mampu mempertahankan peningkatan kualitas hidup bagi generasi yang akan datang.²¹

Pada bulan September 2015, sebanyak 159 kepala negara dalam Sidang Umum PBB menetapkan TPB atau SDGs sebagai Agenda Global 2030, yang menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000-2015, dan kini seluruh negara di dunia melaksanakan 17 tujuan dan 169 target yang terkandung di dalamnya untuk periode tahun 2015-2030.²² Proses pembuatan SDGs sangat berbeda dari MDGs, karena SDGs disusun melalui proses yang lebih partisipatif, termasuk melalui survei Myworld. Prinsip "tidak ada seorang pun yang ditinggalkan" menjadi salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs. Selain itu, SDGs juga menekankan pada prinsip kesetaraan antara negara dan antar warga negara. SDGs berlaku secara universal bagi seluruh negara anggota PBB, termasuk negara maju, negara miskin, dan negara berkembang.²³

Indonesia aktif terlibat dalam perumusan SDGs di forum internasional dan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan 2020-2024 yang selaras dengan TPB/SDGs. Pemerintah

²¹ Kementerian PPN dan Bappenas, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi Ii Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) (Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020), 1.

²² Savitri, Anni, dan Andeas, Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir (Yogyakarta: Dua Pustaka, 2004), 80.

²³ Boge Triatmanto, Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goal's (SDG's) (Malang: Selaras Media Kreasind, 2021), 6.

Indonesia telah mengintegrasikan 124 target TPB/SDGs ke dalam RPJMN tahun 2020-2024 sebagai bentuk komitmen untuk suksesnya pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia dan dukungan terhadap pencapaian Agenda 2030 di tingkat global. TPB memiliki tujuan yang mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan
- b. Mempertahankan keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat
- c. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan mengedepankan pembangunan yang inklusif
- d. Melaksanakan tata kelola yang mampu mempertahankan peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁴

Untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diperlukan penyusunan 3 dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi. Untuk memandu penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs tersebut, telah dibuat Pedoman sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat, baik di tingkat nasional maupun di daerah, yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan Rencana Aksi TPB/SDGs yang jelas dan terukur dalam jangka waktu tertentu.²⁵

- a. Peta Jalan Nasional TPB adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategis yang harus diambil untuk mencapai tujuan TPB pada

²⁴ Desy Mediana Handayani, "Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kediri," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 8, no. 1 (28 Oktober 2019): 2.

²⁵ Savitri, Anni, dan Andeas, *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir* (Yogyakarta: Dua Pustaka, 2004), 80.

periode tahun 2017 hingga 2030, yang selaras dengan sasaran global TPB Tahun 2030 dan juga sasaran pembangunan nasional.

- b. Rencana Aksi Nasional TPB, atau RAN TPB, adalah sebuah dokumen yang berisi program dan kegiatan yang akan diimplementasikan oleh kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan TPB. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada sasaran TPB nasional, serta merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah nasional yang sedang berlangsung.
- c. RAD TPB merupakan dokumen yang berisi program dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Dokumen ini disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional. RAD TPB berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan TPB di tingkat daerah, dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah setempat.²⁶

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016

²⁶ Desy Mediana Handayani, "Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kediri," Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 8, no. 1 (28 Oktober 2019):5.

hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs.²⁷

MDGs memeberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. Secara proses MDGs juga memiliki kelemahan karena penyusunan hingga implementasinya eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder non pemerintah, seperti *Civil Society Organization*, Universitas/ Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya.²⁸

SDGs adalah suatu rencana aksi untuk umat manusia, planet dan kemakmuran. Juga tujuannya untuk memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang luas selain itu untuk mengatasi kemiskinan yang ekstrim adalah tantangan global yang paling besar dan merupakan prasyarat yang tidak dapat dilanjutkan untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan yang ditekankan tidak hanya pada outcome dari pembangunan yang berakhir pada peningkatan kesejahteraan saja, tetapi aspek kehidupan, inklusivitas serta cara dalam pencapaian juga merupakan hal yang ditekankan. Penekanan dari SDGs mencakup pada pemenuhan hak asasi manusia, non diskriminasi, perhatian terhadap kaum marjinal dan difabel, pentingnya partisipasi

²⁷Sekar Panulu, Meila Riskia Fitri, "Perkembangan Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia", Breafing Paper 2, no. 2 (September 2016), 4. [https://www.sdg2030indonesia.org/ancomponent/media/upload_book/breafing_paper_No_1_SDG S_-2016-Meila_Sekar.pdf](https://www.sdg2030indonesia.org/ancomponent/media/upload_book/breafing_paper_No_1_SDG_S_-2016-Meila_Sekar.pdf)

dan kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah, dunia usaha, LSM, Perguruan Tinggi dan Masyarakat).

b. Indikator *Sustainable Development Goals*

Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.²⁹

Dalam Perkembangannya, dengan semakin gencarnya pembangunan berkelanjutan maka berkembanglah konsep ekonomi hijau (*Green Economy*), sebagai konsep yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan. Dengan demikian, ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam.³⁰

²⁹ Kementerian PPN/ Bappenas, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs>.

³⁰ Bappeda, "Ekonomi Hijau (Green Economy) untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", 21 Desember 2020.

<https://bappeda.babelprov.go.id/content/ekonomi-hijau-green-economy-untuk-mendukung-pembangunan-berkelanjutan-di-provinsi-kepulauan>

3. *Sustainable Development Goals (SDGs) Desa*

Desa, atau yang juga dikenal sebagai Desa adat, merupakan suatu entitas hukum yang terdiri dari masyarakat yang memiliki wilayah yang ditetapkan dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Entitas ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹

Program SDGs Desa adalah salah satu program dari Kementerian Desa yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta memberikan keamanan di desa. Program SDGs Desa merupakan program baru yang diinisiasi oleh Kementerian Desa melalui Permendes no 13 tahun 2020 untuk menjadi dasar dalam membangun desa secara berkelanjutan. Program SDGs Desa merupakan program prioritas dalam pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh Dana Desa.³²

SDGs Desa merupakan suatu program pembangunan desa yang terintegrasi dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan secara cepat dan efektif.³³ Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa SDGs desa adalah tindak lanjut tujuan pembangunan berkelanjutan pada tingkat desa agar dapat terlaksana cepat dan efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta

³¹ Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022), 3.

³² Asis Sustiawan, "Efektivitas Program Sdgs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ngabar Ponorogo" (Tesis, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022), 61.

³³ Desy Mediana Handayani, "Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kediri," Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 8, no. 1 (28 Oktober 2019): 2.

memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Desa juga bertanggung jawab untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa. Pada tahun 2023, fokus penggunaan Dana Desa lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, dan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap mempertimbangkan masalah seperti penanganan stunting, padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam yang merupakan kewenangan Desa.³⁴

Program SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa adalah program turunan dari SDGs Nasional negara Indonesia, karena sifatnya yang turunan maka hal tersebut menjadi tujuan dari prospek program SDGs Desa dengan SDGs Nasional. SDGs Desa sejatinya sebuah bentuk pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna memberdayakan dan membangun wilayah pedesaan yang berkelanjutan untuk melawan kesan bahwa pembangunan hanya bersifat kontasentris.

Menurut dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs desa tersebut, yaitu: (1) Desa tanpa kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan; (3) Desa sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan desa berkualitas; (5) Desa berkesetaraan gender; (6) Desa layak air bersih dan sanitasi; (7) Desa yang berenergi, bersih dan terbarukan; (8) Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa; (9) Inovasi dan infrastruktur desa; (10) Desa tanpa kesenjangan; (11) Kawasan pemukiman desa

³⁴ Lenci Aryani dan Sri Handayani, "Self Efficacy Dan Self Motivation Kader Dalam Melakukan Active Case Finding Untuk Menurunkan Epidemii Tuberculosis Dalam Mewujudkan Target SDGs 2030" 16, no. 1 (2017): 30.

berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan; (13) Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa; (14) Ekosistem laut desa; (15) Ekosistem daratan desa; (16) Desa damai dan berkeadilan; (17) Kemitraan untuk pembangunan desa; (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.³⁵

Pendataan yang dilakukan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (PDDT) No. 21 tahun 2020 ialah proses pengumpulan, evaluasi, validasi dan verifikasi data SDGs Desa, ini mencakup informasi tentang asset actual dan potensial negara, serta kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan yang dapat digunakan sebagai saran penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, juga terdapat data dan informasi lain yang menunjukkan kondisi actual dan potensial negara serta kondisi penduduknya.³⁶ Dengan demikian SDGs Desa menjadi representasi Indonesia sebagai negara yang peka terhadap isu-isu terkait pedesaan, dengan jumlah total pedesaan di Indonesia sebanyak 74.943 desa.³⁷

4. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Grand theory Kesejahteraan yaitu *Welfare State* menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah *„utility*’ (kegunaan) untuk

³⁵ PerMenDesa, PDDT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Pub.L.No.13,1(2020).<http://sdgsdesa.kemendesa.go.id/wpcontent/upload/2020/12/PeraturanMenteri,13Oktober2022>

³⁶ <https://kemendesa.go.id/berita/?masuk=Masuk+Website,13oktober2022>

³⁷ Mohammad Reza, “SDGs Desa dan Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Berkelanjutan, 11 mei 2022, <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-desa-dan-rekonstruksi-paradigma-pembangunan-berkelanjutan/>

menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.³⁸

Menurut W.J.S Poerwadarminta kesejahteraan adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam kata lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka terciptalah kesejahteraan. Sedangkan menurut Mosher hal yang terpenting dari kesejahteraan adalah pendapatan, dimana aspek dari kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pendapatan rumah tangga.³⁹ Robert L Barker mengartikan kesejahteraan merupakan sebagai kondisi dimana kesehatan fisik, ketenangan emosi/batin, serta ketenangan di bidang ekonomi, serta kemampuan suatu golongan menolong masyarakatnya untuk mencapai kondisi atau keadaan tersebut.⁴⁰

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

³⁸ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol* 2, No.1 (September 13, 2016): 103, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4759>.

³⁹ Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerjadan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga" *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 1, no.2 (November 2012), 2.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/472>

⁴⁰ C. Parmuwito, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 1997), 23-24.

Kesejahteraan juga merupakan suatu konsep yang dinamis yang bergerak sejalan dengan perubahan lingkungan, karenanya konsep kesejahteraan di kembangkan mencakup kesejahteraan individu, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan lingkungan.⁴¹

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2005 untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan 8 pendekatan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.⁴²

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam keberadaan makhluk lain, dan hidup berdampingan dengan sesamanya. Ia selama hidup di dunia sejak lahir sampai mati, memang tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Karena itu manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial (yang bermasyarakat).⁴³ Hubungan antar manusia di dalam al Qur'an adalah adanya penciptaan Allah yang berbeda-beda dalam kehidupan manusia seperti laki-laki dan perempuan, suku-suku yang banyak, berbangsa-bangsa, bahasa yang berbeda-beda, serta warna kulit yang tidak sama dan berbagai keanekaragaman lainnya agar manusia tersebut saling mengenal satu sama lainnya dan bukan untuk menjelekkan perbedaan tersebut. Namun, bagaimana mereka bisa bersatu dengan segala

⁴¹ Nurdin Batjo, Muh. Shadri Kahar Muang, dan Luluk Maulani "Berbelanja di Warung Tetangga", (Jakarta: 2016), 7.

⁴² Eko Sugiharto., "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik", *Jurnal sosial* 4. No. 2, (Juli, 2007): 32-36, <http://agb.faperta.unmul.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/jurnal-vol-4-no-1-eko.pdf>.

⁴³ Kaelany, "Islam & Aspek-Aspek Kemasyarakatan", Bumi Aksara, 2000: 157, <http://inlis.bojonegorokab.go.id/opac/pencarian-sederhana?action=pencarianSederhana&katakunci=islam&ruas>.

perbedaan tersebut untuk menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis yang penuh dengan kedamaian, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya dan mereka tidak akan bisa hidup dengan individu mereka sendiri.⁴⁴

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam setiap agenda pembangunan pemerintah, hal ini didasarkan pada amanat UUD tahun 1945 yang menyatakan kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Terdapat definisi lain terkait kesejahteraan masyarakat, yaitu:

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1), tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴⁵

Para ahli ulama juga memberikan definisi kesejahteraan menurut perspektif ekonomi islam. Menurut Al-Syatibi dalam Ekonomi Islam keuangan publik pemikiran islam awal, yang dimaksud dengan masalah yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan manusia, terpenuhinya kebutuhan manusia dan diperolehnya apa yang diperlukan oleh sifat emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.⁴⁶

Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu sebagai berikut :

⁴⁴ Mustaniruddin, A., "Konsep Al-Qur'an dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani", *At-Tibyan* 2, 2019: 47,

<http://at-tibyan.fusa.uinjambi.ac.id/index.php/ATB/article/download/6/3/>.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat (1).

⁴⁶ Sabahuddin, "Ekonomi Islam Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal", (Bandung: Nuansa, 2005), 186.

1) Kesejahteraan Holistik dan Seimbang

Mencakup materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

2) Kesejahteraan di Dunia dan di Akhirat

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Mencakup materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecakupan di akhirat. Jika kondisi ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (valuable) dibandingkan kehidupan dunia.⁴⁷

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Pengukuran kesejahteraan sering menggunakan pembagian kesejahteraan ke dalam dua bagian yaitu kesejahteraan subjektif dan objektif. Pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif yaitu berkaitan dengan aspek psikologis yang diukur dengan kebahagiaan dan kepuasan sedangkan mengukur kesejahteraan bersifat objektif menggunakan patokan yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan perkapita dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup dengan layak.

⁴⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 5.

Dalam mengukur kondisi kesejahteraan sosial masyarakat para ilmuwan menggunakan berbagai macam indikator. Badan Pusat Statistik mengukur kesejahteraan masyarakat melalui delapan bidang yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan dan sosial lainnya.

Dalam penelitian Sugiharto (2005) menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan menurut BPS ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.⁴⁸

Selain itu, Sunarti menjelaskan bahwa indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah: Satu, Kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, fertilitas dan migrasi. Dua, Kesehatan, meliputi derajat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup, angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita. Tiga, Pendidikan meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah, dan fasilitas pendidikan. Empat, Ketenagakerjaan meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja serta pekerjaan anak. Lima, Taraf dan pola konsumsi meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan). Enam, Perumahan dan Lingkungan meliputi

⁴⁸ Eko Sugiharto, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik," *Jurnal* 4, no 2, (2007): 32-36, <http://agb.faperta.unmul.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/jurnal-vol-4-no-1-eko.pdf>.

kualitas rumah tinggal, fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan. Tujuh, Sosial budaya meliputi akses pada informasi dan hiburan serta kegiatan sosial lainnya.⁴⁹

Dalam Al-Qur'an surat Quraisy ayat 3 - 4 menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan beberapa ahli.

Menurut World Bank, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*increase in property*), peningkatan kemampuan baca tulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*increase il infant mortality*), peningkatan harapan hidup (*life expentancy*), dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease income inequality*).⁵⁰

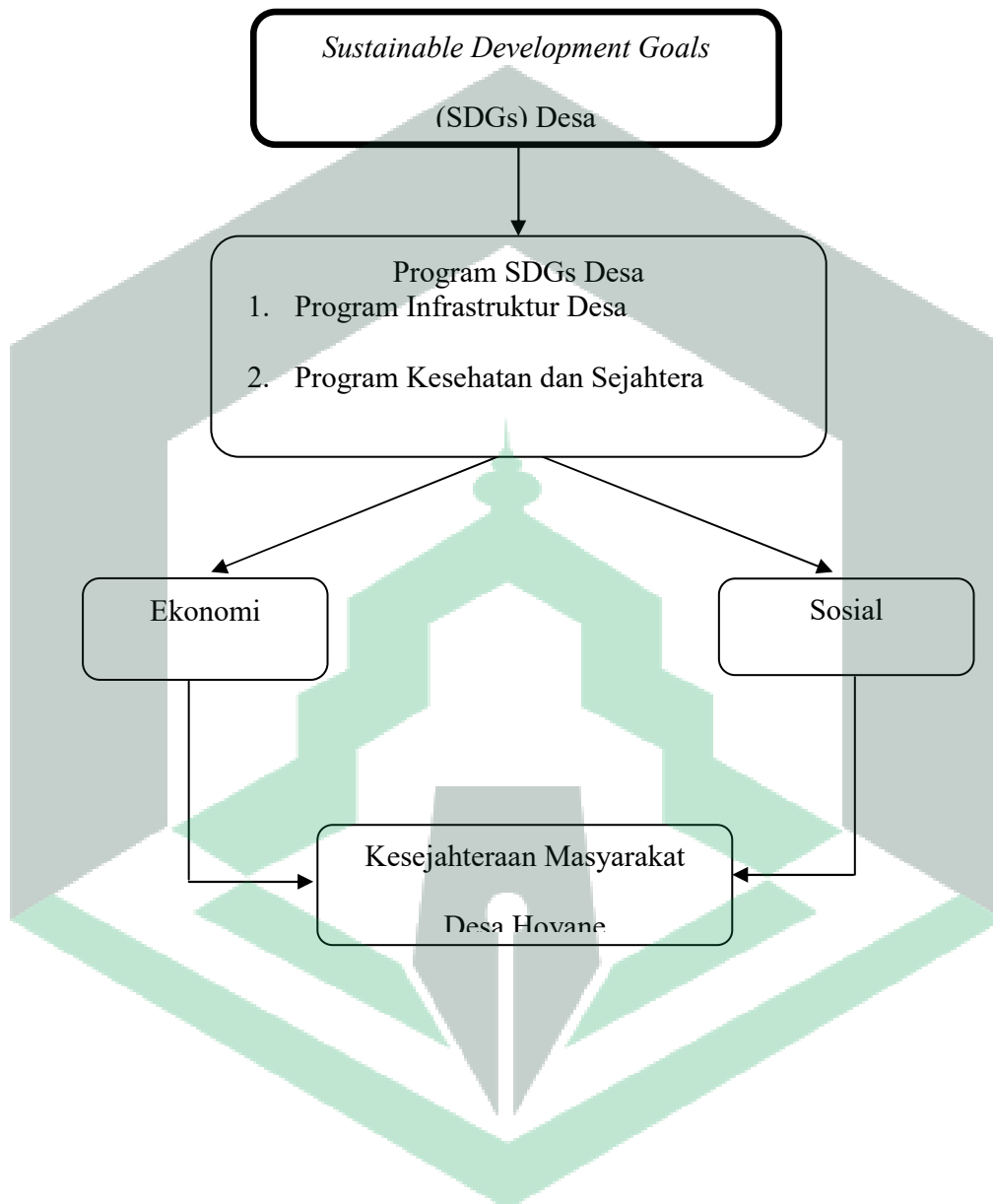
C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, sebagaimana kerangka kerja ini disusun berdasarkan tinjauan literatur dan temuan penelitian yang relevan. Kerangka berpikir diuraikan sebagai

⁴⁹ E Sunarti, "Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya," (Institut Pertanian Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, 2006): 116.

⁵⁰ Rudi Badrudin, "Ekonomika Otonomi Daerah", Yogyakarta UPP STIM YKPN , 2012, 150,<http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=204015&pRegionCode=UN11MAR&pClientId=112>

pedoman untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penelitian. Penggunaan jenis penelitian tentunya membutuhkan langkah-langkah yang logis serta alamiah. Oleh karena itu, peneliti harus menggunakan langkah-langkah untuk memperoleh data penelitian yang akurat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan system pengumpulan data pada sebuah data alamiah dengan tujuan menafsirkan gejala yang terjadi dimana peneliti adalah alat kunci. Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti transkripsi, wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.⁵¹ Menurut Poewardari, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman, video, dan lainnya.⁵²

Dalam penelitian ini yang didasari oleh sejumlah masalah yang tertuang dalam latar belakang peneliti, serta disesuaikan dengan tujuan penelitian ini

⁵¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ed.I; Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 92.

⁵²Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,(Ed.III; Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 130.

menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti akan menggambarkan bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2009) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data dan deskriptif berupa informasi tertulis dan lisan dari seorang dan perilaku dapat diamati.⁵³ Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa jenis data kualitatif adalah data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, jenis dan data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.⁵⁴

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu gambaran tentang implementasi sustainable development goals dalam mensejahterakan masyarakat, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang penulis peroleh sebagai hasil suatu penelitian. Dengan menggunakan metode ini, maka penulis akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada.

B. Fokus dan Batasan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di dalam latar belakang penelitian ini berfokus pada pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.

⁵³ Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,”* Bandung: Remaja Rosdakarya, (2011): 4.

⁵⁴ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,”* Bandung: Alfabeta, (2010): 2.

Untuk membatasi penelitian ini agar pembahasan didalamnya tidak melebar maka peneliti membatasi agar lebih terfokus dan jelas tujuan penelitiannya. Batasan dalam penelitian ini membahas infrastruktur yang dapat menjadi sarana dasar pelayanan dalam kegiatan pembangunan sehingga masyarakat dapat terarah dalam melakukan perwujudan yang layak, produktif, dan berkelanjutan.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian, setelah mempertimbangkan dengan melihat fakta lapangan bahwa di daerah tersebut terdapat beberapa infrastruktur yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023.

D. Defenisi Istilah

Dalam rangka memudahkan proses analisa data yang diperoleh maka defenisi istilah yang akan dioperasikan ke dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan, implementasi sendiri ialah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

2. Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam setiap agenda pembangunan pemerintah dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data manusia atau biasa disebut informan. Hal ini peneliti menguraikan siapa-siapa yang menjadi sumber data untuk memperoleh data yang valid (asli). Peneliti memaparkan data yang diperoleh dari perpustakaan seperti buku-buku, internet, maupun yang lainnya. Adapun jenis data yang disajikan sebagai sumber data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang ditelitidan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara dan observasi.⁵⁵ Data primer adalah data yang bersumber langsung dari responden melalui wawancara kepada

⁵⁵ Situmorang Syafrizal, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, (Ed.I; Medan: USU Press, 2010), h. 9.

para responden dengan harapan dapat menjawab dengan baik dan memberikan informasi yang jelas dan akurat terhadap pertanyaan yang telah di berikan terkait dengan judul.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang diperoleh dari studi dokumentasi atau membaca referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian serta data-data ataupun dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵⁶

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data ini diperoleh dengan cara:

- a) Pencatatan, yaitu dengan mencatat dari laporan-laporan yang mendukung penelitian.
- b) Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi yang terkait dengan objek peneliti.
- c) Literatur, yaitu dari data internet dan buku-buku yang dianggap relevan dalam memberikan informasi terutama dalam hal menunjang tinjauan teoritis terhadap penulisan ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan sarana yang dapat

⁵⁶ V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (JilidI; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 73-74.

diwujudkan dalam benda, misalnya pedoman wawancara, pedoman observasi, skala dan sebagainya.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti bertindak sebagai *Human instrument* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama: Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang ada kemudian dilakukan pencatatan. Kedua: Wawancara yaitu percakapan atau tanya jawab yang dilakukan pengumpul data dengan responden sehingga responden memberikan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian. Ketiga, Dokumentasi adalah suatu peristiwa yang berlaku, yang dapat berbentuk pencatatan, tulisan, gambaran maupun karya-karya yang bernilai dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pendukung dari metode observasi dan metode wawancara dalam suatu penelitian jenis kualitatif.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁷

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 296.

Pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah proses memperoleh data atau informasi yang menyangkut masalah yang akan diteliti melalui penelaahan buku, jurnal dan karya tulis lainnya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan penelitian langsung turun ke lokasi penelitian untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam studi lapangan ada tiga instrument penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Observasi atau pengamatan merupakan teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung.⁵⁸ Pengamatan dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, kejadian, fenomena, yang terjadi di lokasi penelitian. Sehingga observasi berada bersama dengan objek yang sedang diteliti, di sebut observasi langsung.

2. Wawancara

⁵⁸Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Cet.XI; Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 216.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan dapat dilakukan secara langsung apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan dengan alat komunikasi, seperti telepon.⁵⁹ Menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang masalah dan pertanyaan-pertanyaannya ditetapkan sendiri oleh pewawancara. Seperti menggunakan pedoman wawancara. Ini berarti peneliti telah mengetahui data dan menentukan data dan menentukan fokus serta perumusan masalahnya.⁶⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi. Jenis data ini memiliki sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.⁶¹

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku yang terkait dengan penelitian, dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan suatu informasi, dimana semua kegiatan yang berkaitan dengan photo dan penyimpanan photo. Untuk memperoleh data yang lebih jelas, peneliti mengumpulkan dokumen-

⁵⁹ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 150.

⁶⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 72.

⁶¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Jilid I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 73-74.

dokumen yang berhubungan penelitian yaitu dengan cara mengambil gambar dengan kamera dan alat rekam sebagai alat untuk wawancara.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan itu benar-benar penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Dari begitu banyak cara pengujian peneliti memilih beberapa saja sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkelanjutan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagi waktu. Menurut

Patton, ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data untuk mencapai keabsahan data, yaitu sebagai berikut:⁶²

a. Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, observasi atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamat (*Expert Judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi.

3. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebaliknya data-data yang telah ditemukan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik,

⁶²Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ed.III; Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 130.

sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi fotografi.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data dan informasi yang telah diperoleh dari proses pengambilan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan prosedur yang tepat sesuai jenis data dan rancangan yang telah dirumuskan.⁶³

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyusunan data, dan mengelompokkan data dan mengurutkan data secara benar dari hasil observasi, wawancara, dan sumber lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Koleksi data (*Data Collection*)

Koleksi data atau disebut juga dengan pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian yang diambil, teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 3 cara yaitu (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Tujuan dari koleksi data ini yaitu untuk mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya sebagaimana

⁶³Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ed.III; Bandung: CV PustakaSetia, 2018), h. 130.

dibutuhkan pada penelitian ini. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan apa yang ditarik serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian.⁶⁴

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Dalam tahap ini penulis memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan permasalahan peneliti dibuang. Data yang belum direduksi berupa catatan-catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi-informasi yang diberikan informan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan demikian akan lebih memudahkan penulis terhadap masalah yang diteliti. Selanjutnya data-data tersebut penulis reduksi dan kaji secara mendalam dengan mengedepankan dan mengutamakan data-data yang penting dan bermakna. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sehingga gambaran dan hasil akan lebih jelas.

Reduksi data merupakan salah satu proses pemilihan data yang dianggap penting pada saat melakukan pengumpulan data dan apabila ada data yang didapatkan namun tidak dianggap perlu dalam penelitian maka data itu dapat dihilangkan oleh peneliti. Dalam proses reduksi harus mencari dan memilih data yang benar-benar valid. Dengan demikian data yang diperoleh melalui reduksi data akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

3. Penyajian data (*Display*)

⁶⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&BB," (Bandung: Alfabeta, 2010): 225.

Setelah peneliti melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk deskriptif, table dan sebagainya. Dengan melakukan penyajian data, maka dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang benar terjadi sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dari beberapa pernyataan yang didapat di lapangan melalui wawancara sehingga dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah.

Dalam penyajian data ini penulis menyajikan hasil penelitian, bagaimana temuan-temuan baru itu dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang diperoleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasian dengan teori.

4. Penarikan kesimpulan

Analisis data berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan data-data hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti di lokasi penelitian. Setelah peneliti menarik kesimpulan maka rumusan masalah yang dirumuskan penelitian terjawabkan pada tahap ini. Dalam proses ini selalu disertai dengan upaya verifikasi (pemikiran kembali), sehingga saat ditemukan ketidaksesuaian antara fenomena, dan data, dengan konsep dan teori yang dibangun, maka peneliti kembali melakukan pengumpulan data, atau reduksi data atau perbaikan dalam penyajian data kembali, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang benar-benar utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukannya daerah ini memiliki luas 14.447,56 km² dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa. Namun setelah dimekarkan kembali dengan membentuk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2003 maka saat ini luas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,58 km² dengan jumlah penduduk 312.883 jiwa (2019).⁶⁵

Secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara 2°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai 121°43'11" Bujur Timur dibagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas mencapai 7.502,58 km² atau sekitar 16,39% dari Luas Wilayah Provinsi.⁶⁶

Seko adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Utara. Terdapat pengertian mengenai nama Seko, menurut informan kata Seko berarti sahabat atau saudara. Kata Seko muncul dari istilah Sisekoang yakni ikatan hidup harmonis dalam segala perbedaan. Padanan kata yang sama dengan kata ini ialah *lea* yang

⁶⁵ Wikipedia, Kabupaten Luwu Utara, Diakses pada tanggal 29 Maret 2023.

⁶⁶ Luwuutarakab.go.id, Diakses pada tanggal 29 Maret 2023.

diartikan sebagai saudara, kerabat dan sahabat.⁶⁷

Disebut seko tengah karna berada ditengah yang diapit oleh seko padang dan seko lemo. Nama ini menindikasikan bahwa seko tengah adalah gabungan dari dua etnis suku yang ada di seko, secara turun temurun seko tengah terbagi menjadi beberapa desa, Yaitu: Ambalong, Lambiri, Longga, Tanamakaleang, dan Hoyane.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Desa Hoyane Kecamatan Seko
(Hoyane.luwuutarakab.go.id, 2023)

Komunitas Adat Hoyane secara historis berasal dari Daerah Tabulaang Mamasa. Dimana Tosumalu melahirkan 5 Orang anak yaitu Hane, Honeang, Balong, Padang, Pottappa. Hane adalah merupakan anak pertama dari Tosumalu yang di beri gelar Torije'ne artinya berasal dari air. Dari tabulaang mamasa mereka berpencar lagi mengikuti sungai betue dan Hane naik ke hoyane. Wilayah Adat Hoyane itu diambil dari nama seorang yang pertama mendiami kampung

⁶⁷ Tembo, (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Desa Hoyane, 31 Agustus 2023.

hoyane yang keturunan dari Hane kemudian Hane Melahirkan Lima orang anak laki-laki yang bernama tahono (tapadang), tabalong, tahaneang, tayane dan seorang lagi yang berprofesi sebagai pottagga (pandai besi). Dari keturunan Hane sehingga dapat dikatakan Hoyane berasal dari nama leluhur yakni “Yane” dimana leluhur ini adalah orang yang pertama kali mendirikan kampung dan kata “Ho” diambil dari nama “Hane” yang kemudian di beri nama Hoyane. Desa Hoyane merupakan desa terpencil di kecamatan seko yang terletak 156 km dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara dan 38 km arah selatan dari ibu kota Kecamatan Seko.

Tabel 1.1 Batas Wilayah

Sebelah Utara	Sokko uhe, tetebang, patappe, matina, haung sapine’, kab. Sigi dan Poso Sulawesi Tengah
Sebelah Selatan	Haung Betue WA Pohoneang
Sebelah Timur	Haung Tomatua WA Pohoneang
Sebelah Barat	Hatu Silumbang, sappona malekko, takalaku, wilayah karama’ mamuju Sulawesi Barat

Sumber data: Profil Desa Hoyane

Desa Hoyane memiliki luas wilayah sebesar 18.971 Ha dengan kondisi fisik pegunungan. Secara geografis wilayah Desa Hoyane terletak di sebelah barat berbatasan dengan Hatu Silumbang, sappona malekko, takalaku, wilayah karama’ mamuju Sulawesi Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Haung Betue WA Pohoneang, sebelah timur berbatasan dengan Haung Tomatua WA Pohoneang dan sebelah utara berbatasan dengan Sokko uhe, tetebang, patappe, matina, haung sapine’, kab. Sigi dan Poso Sulawesi Tengah.

Dalam kehidupan masyarakat memiliki perkumpulan yang di kenal dengan sebutan Sallombengang yang berarti ritual yang dilaksanakan untuk merekatkan ikatan persatuan dan persaudaraan antara wilayah adat (katobaraang) di Seko.

Dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran, kesetiaan, perdamaian dan kesetaraan hidup dalam ikatan yang kuat (tuh' sakkapu'). Dengan visi "Mewujudkan Kesejahteraan Bersama" yang di implementasikan kedalam misi desa diantaranya adalah:

- Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
- Serta menjadikan Desa Hoyane yang religius, mandiri secara politik, ekonomi, dan bermartabat secara budaya."

Desa Hoyane terdiri dari 3 Dusun yakni; Dusun Hoyane, Dusun Katuhanna, dan Dusun Pattahe.

a. Demografi Penduduk

Desa Hoyane memiliki jumlah penduduk 967 jiwa, dengan jumlah 264 kepala keluarga dengan angka perbandingan pria yang berjumlah 514 jiwa serta wanita berjumlah 453 jiwa.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	Jiwa
Wanita	453
Pria	514
Jumlah	967

Sumber Data: Profil Desa Hoyane

b. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Desa

Keberadaan Sarana dan Prasarana Desa	Keterangan
Kantor Desa	Ada
Kantor BPD	Tidak Ada
Kantor Kepala Dusun	Tidak Ada

Balai Desa	Tidak Ada
Sekolah	3 Unit
Pustu	1 Unit
Rumah Ibadah (Masjid & Gereja)	4 Unit
Lapangan Olahraga	Ada
Rumah Pandai Besi	2 Unit
Jalan Desa	2 Km

Sumber data: Profil Desa Hoyane

c. Penduduk Berdasarkan Agama

Ditinjau dari segi agama yang dianut masyarakat Kelurahan/Desa Hoyane, maka penduduk Desa Hoyane menganut dua agama yaitu islam dan kristen. Terdapat 1 unit mesjid dan 3 unit gereja yang menjadi tempat ibadah warga setempat.

d. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	78
2	Tidak Tamat SD	9
3	Tamat SD/Sederajat	20
4	Tamat SMP/Sederajat	112
5	Tamat SMA/Sederajat	230
6	Tamat D1	-
7	Tamat D2	-
8	Tamat D3	4
9	Tamat S1	39
10	Tamat S2	1
11	Tamat S3	-
Total		493

Sumber Data: Profil Desa Hoyane

Menurut data di atas tingkat pendidikan yang paling banyak adalah SMA/Sederajat berjumlah 230 jiwa dan yang paling sedikit adalah Diploma I, Diploma II, dan Tamatan S3 yang berjumlah 0 jiwa. Dari tabel di atas terlihat

bahwa mayoritas masyarakat Desa Hoyane hanya sampai tingkat SMA/Sederajat, masih sangat minim yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu perlu adanya dorongan dan perhatian untuk meningkatkan pendidikan di Desa Hoyane.

e. Keadaan Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

Indikator yang dijadikan ukuran tingkat peradaban suatu masyarakat dicirikan oleh karakteristik dari jenis pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakat setempat. Mata pencaharian atau pekerjaan akan berpengaruh nyata dilingkungan masyarakat. Semakin bervariasi jenis pekerjaan yang digeluti, maka status sosial akan semakin baik. Hal ini berkaitan dengan besarnya penerimaan dari berbagai cabang usaha yang dikerjakan. Sumber pendapatan diperoleh dari dua sektor yakni pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan.

Ada beberapa hal yang mendorong petani untuk melakukan pekerjaan sampingan diantaranya seperti mengisi waktu luang atau waktu kosong, ingin mencoba lapangan kerja baru yang mungkin asing bagi mereka dan tak kala pentingnya adalah untuk menambah pendapatan keluarga. Di Desa Hoyane mata pencaharian penduduk yang dominan adalah petani coklat, walaupun juga ada yang bergerak di bidang lain. Untuk melihat jenis mata pencaharian yang dilakoni masyarakat Desa Hoyane, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	persentase (%)
1.	Petani	604	70,10
2.	Wiraswasta	25	20,70

3. PNS/ Honorer	13	9,20
Jumlah	642	100%

Sumber Data: Profil Desa Hoyane

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara pada umumnya didominasi oleh sektor pertanian yaitu petani coklat sebanyak 604 orang atau 70,10%, hal ini menggambarkan bahwa profesi yang dilakoni masyarakat adalah bertani selebihnya adalah sektor lain seperti wiraswasta sebanyak orang atau 20,70%, pegawai negeri sipil/ Honorer sebanyak 13 orang atau 9,20%.

B. Hasil Penelitian

1. Bentuk Implementasi Program SDGs oleh Pemerintah Desa Hoyane dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara

Tujuan SDGs Desa adalah melakukan pembangunan yang bermodelkan kebijakan *bottom-up* sehingga lebih berhasil dan memenuhi kebutuhan penduduk secara luas. Prinsip dasar SDGs Desa adalah menghilangkan kesan pembangunan yang berfokus pada kotasentris. Sebagaimana yang diketahui secara umum, penduduk pedesaan seringkali diberi label seperti “Masyarakat Tertinggal”, “Masyarakat tidak Berkembang”, “Kuno”, dan lain-lain. Oleh karena itu, hadirnya SDGs Desa bertugas untuk menyeimbangkan tingkat pembangunan yang berada di kota, dengan maksud desa juga diharuskan berkembang dan sejahtera, baik itu secara ekonomi maupun sosial.

Dalam rangka memperlancar tugas-tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat maka perlu didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur yang

memadai. Salah satunya pembangunan sarana dan prasarana karena dengan adanya infrastruktur yang memadai maka tugas-tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif. Dan disisi lain dapat memudahkan aksesibilitas penduduk dalam segala bentuk yang menyangkut kegiatan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur adalah unsur yang sangat penting karena salah satu kategori daerah tertinggal dilihat dari kemajuan infrastrukturnya. Maka dari itu penulis melihat bahwa Desa Hoyane masih tertinggal jauh dalam hal infrastruktur hal ini diperkuat dengan melihat kondisi infrastruktur Desa Hoyane dalam segi pembangunan jalan yang hingga kini masih belum ada perubahan. Pembangunan infrastruktur memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang kelancaran perkembangan dan pengembangan suatu daerah karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai cenderung dalam proses pembangunan akan terhambat bahkan hasilnya pun kurang optimal. Pentingnya infrastruktur bagi suatu daerah ditandai oleh nilai manfaat dan kegunaan infrastruktur tersebut. Dilihat dari nilai yang menghubungkan antar wilayah kewenangan, mobilitas ekonomi, transportasi dan lain sebagainya. Hal ini persis dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ardi Selaku Tokoh Adat masyarakat Desa Hoyane, yang mengatakan bahwa:

“Jika dilihat dari segi pembangunan sudah lumayan yang dibangun desa sebelumnya akan tetapi melihat pembangunan desa sekarang memang

sangat minim dan hingga saat ini belum nampak program pembangunan yang diprogramkan. Kemarin sempat ada dua program yang di realisasikan tapi menurutku itu tidak termasuk karena itu hanya program lanjutan dari desa sebelumnya. Kami juga sebagai masyarakat mengharapkan adanya perubahan dalam desa bukan hanya dari segi ekonomi akan tetapi dari segi pembangunan juga.”⁶⁸

Namun jika dilihat dari pandangan pembangunan yang merupakan sebuah proses dalam tahap perencanaan. Di tahap perencanaan dibutuhkan aspirasi dari masyarakat yang menghendaki perubahan taraf hidup yang lebih baik. Pendapat dari masyarakat bisa berupa fakta dan data mengenai kondisi aktual dari masyarakat, bagaimana tingkat perekonomian masyarakat, kesehatan, pembangunan dan pekerjaan yang dimiliki.

Program SDGs Desa pada umumnya $\frac{1}{2}$ telah dilaksanakan oleh Desa Hoyane. Desa ini mengelola potensi desanya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dominggus selaku Kepala Desa Hoyane, yang mengatakan bahwa:

”Kami mengelola potensi desa kami pada hasil pertanian berupa coklat. Kami membuat jalan tani untuk dusun-dusun agar masyarakat dapat mengelola lahan pertanian dengan baik. Pertanian merupakan mata pencaharian utama warga Hoyane karena sebagian besar wilayah kami adalah kebun dan sawah. Untuk program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pertama perbaikan infrastruktur supaya masyarakat dapat terdorong dalam membuka lahan perkebunan. Hal ini termasuk program ulangan, kemudian kita mencoba memberikan pembinaan-pembinaan berupa arahan kepada warga untuk bagaimana mengelola lahan dengan baik, saya kira bahwa warga yang masih rentang miskin dapat teranggulangi. Untuk bantuan dari pemerintah pusat kita memprioritaskan warga yang rentang miskin juga, dan untuk merubah perekonomian keluarga disini kami mencoba membangun komunikasi dengan pemegang modal atau pemilik gudang pembelian coklat agar hasil bumi warga disini harganya semakin meningkat. Kami juga mencoba membangun komunikasi dengan pemerintah desa tetangga dan pemerintah sulbar tentang infrastruktur jalan. Mencoba juga untuk bekerja sama dengan desa tanamakaleang untuk perbaikan infrastruktur kedesa hoyane karena kendala utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah infrastruktur

⁶⁸ Ardi (65 Tahun), Tokoh Adat Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Senin, 28 Agustus 2023.

jalan. Apabila akses ke sulbar sudah bagus otomatis warga akan lari ke sulbar dan saya yakin paling tidak hasil bumi desa hoyane akan meningkat 70%.⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa wilayah Desa Hoyane sebagian besar adalah kebun dan sawah, maka dari itu perlu adanya implementasi program SDGs Desa seperti infrastruktur jalan tani, jalan kecamatan, pembenahan infrastruktur lainnya agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses hasil pertaniannya.

Program SDGs Desa telah memberikan manfaat yang signifikan bagi wilayah pedesaan, pertama sebagai bentuk perwujudan nyata pemerintah dalam konteks pembangunan yang inklusif bagi seluruh kalangan. Kedua, mendapatkan informasi yang akurat yang terkini tentang kondisi masyarakat. Ketiga, menjadikan kawasan pedesaan memiliki tujuan pembangunan yang jelas, apakah itu dari masyarakat, sosial, ekonomi, lingkungan dan lainnya. Keempat, memberdayakan masyarakat desa yang masih menjadi wilayah kemiskinan terbanyak di Indonesia. Sebagaimana pendapat Bapak Dominggus C Pawongan yang mengatakan bahwa:

“Kalau kita melihat dari segi kemiskinan. Saya melihatnya memang masih ada kategori masyarakat yang masih rentang miskin dan istilahnya masih dalam kategori sangat miskin. Akan tetapi kami berupaya bekerja sama dengan semua pihak dan subangan kita sama dengan pemda sampai kepusat untuk kemudian mencoba membantu dana desa kalau ada kegiatan-kegiatan lain atau semacam dana-dana lain seperti dana spesifikasi untuk membantu bagaimana mendorong perekonomian keluarga kita disini, selain itu juga kita mencoba mendorong warga disini untuk bisa mandiri secara ekonomi, dalam artian bahwa di satu sisi SDM warga disini masih penting untuk ditingkatkan tapi untuk persediaan sumber daya alam ini jika dikelola dengan baik sudah cukup untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi salah satu contoh meningkatkan adalah perbaikan infrastruktur- infrastruktur seperti jalan tani itu yang sangat penting, artinya bahwa masyarakat bisa membuka lahan-lahan yang produktif untuk

⁶⁹ Dominggus C Pawongan (40 tahun), Kepala Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Senin 28 Agustus 2023.

tanaman-tanaman kita dalam kategori tanaman bibit unggulan. Salah satu contohnya adalah coklat yang paling berpotensi untuk meningkatkan perekonomian warga disini.”⁷⁰

Hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi kemiskinan di Desa Hoyane, pemerintah merupakan orang yang berperan penting dalam memberikan dorongan terhadap perekonomian warga agar SDA yang ada dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Kemudian kepada masyarakat yang masih tergolong miskin diupayakan dapat merubah pola pikir yang masih terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah agar bisa mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan wawancara dengan Alson, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi, di dalam pembangunan Desa Hoyane ini kita utamakan itu jalan, yang ada di lingkungan antar rumahnya masyarakat ataupun gang dekat rumah warga dan di utamakan juga jalan yang dilalui untuk mengangkut hasil tani masyarakat agar tidak kesulitan mi lagi apabila sudah ada jalan untuk membawa hasil pertaniannya. Kami juga melakukan perbaikan jembatan yang menghubungkan desa kami dengan desa lainnya dan semenisasi jalan dan pembangunan drainase.”⁷¹

Dari wawancara di atas dapat dianalisis bahwa arah pembangunan infrastruktur di desa hoyane tidak hanya mengutamakan jalan akan tetapi ada juga pembangunan infrastruktur lainnya seperti gorong-gorong, drainase, dan semenisasi jalan agar akses tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam beraktifitas baik di lingkungan rumah atau ke lahan pertaniannya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam model pembangunan sejak diberlakukannya *Milenium Development Goals* (MDGs) yang berlanjut dengan

⁷⁰ Dominggus C Pawonganan (40 tahun), Kepala Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Senin 28 Agustus 2023.

⁷¹ Alson (29 tahun), Bendahara Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Selasa 29 Agustus 2023.

Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pembangunan desa sudah diadopsi dalam rencana pembangunan maupun sudah dilaksanakan serta disesuaikan dengan kemampuan dan potensi desa yang ada. Dalam hal ini menurut Kepala Dusun Pattahe, Bapak Hairuddin yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku pemerintah desa lebih menekankan pada berbagai aspek pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, perluasan akses pendidikan, kesehatan dan juga pelayanan masyarakat lainnya tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat seperti hak untuk menjalankan kehidupan yang layak.”⁷²

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Hamran selaku Pemerintah Desa Hoyane, yang mengatakan:

“Kami ikut terjun langsung ke lapangan untuk kemudian mereka sekaligus menjadi motifator bagi masyarakat. Terkait dengan kendala dalam merealisasikan suatu program SDGs Desa tentu masih ada diantaranya ada warga yang tertutup, misalkan kita mau melakukan perbaikan infrastruktur ada warga yang tertutup dalam artian tidak terbuka apabila kita membuka jalan tani seolah mereka tidak memberikan ruang untuk melakukan program tersebut, padahal program itu dilakukan agar mereka muda mengakses hasil dari pertaniannya. Dan sebagai pemerintah desa sekarang kami berupaya paling tidak ada perubahan, kita harus optimis, dan apabila masyarakat terbuka saya yakin infrastruktur akan memberikan peningkatan.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program SDGs Desa adalah suatu program dari pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat akan tetapi masih terdapat masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam hal segi pembangunan yang di programkan oleh pemerintah desa, hal ini mengakibatkan ketidak majuan suatu pembangunan. Maka dari itu perlu pemerintah desa memberika himbauan atau arahan agar masyarakat dapat mengerti dengan maksud

⁷² Hairuddin (30 tahun), Kepala Dusun Pattahe, Wawancara, Hoyane, Senin 28 Agustus 2023.

⁷³ Hamran (31 tahun), Sekeretaris Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Senin 28 Agustus 2023.

tujuan dari suatu program pembangunan yang dilaksanakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan Bapak Abdullah selaku anggota BPD sekaligus relawan SDGs, sebagai berikut:

“Menurut saya program SDGs ini di katakan bagus, karena arah pembangunannya yang lebih terarah dan lebih terfokus, agar pemerintah desa mengetahui keberadaannya dan keadaan masyarakatnya.”⁷⁴

Wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa keberadaan SDGs dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hal ini sangat produktif untuk difokuskan di setiap desa agar pembangunan desa dapat terarah dengan baik.

Indikator pembangunan sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu desa dalam pembangunan ekonomi maupun sosial. Dalam lingkup infrastruktur di Desa Hoyane pemerintah desa melakukan sosialisasi dokumen hasil rencana kerja pelaksanaan pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat desa, dalam wawancara yang dilakukan bersama Bapak Hamran (Sekertaris Desa Hoyane) mengatakan bahwa:

“Untuk sosialisasi ini kita lakukan melalui musyawarah-musyawarah dan pertemuan, dalam pertemuan desa bersama kepala dusun kemudian dusun ditugaskan untuk menginformasikan lingkungannya terhadap pembangunan yang dilakukan, kemudian juga dari musyawarah kelompok-kelompok yang ada di desa, kelompok tani dan sebagainya, kemudian kita juga paparkan pada papan informasi dan kegiatan yang mau dijalankan jadi siapa saja yang lewat bisa melihat. Untuk pengadaan tenaga kerja memang tidak bisa juga mau direkrut semua itu masyarakat karena pembuatannya juga tidak sembarangan orang jadi perlu pi yang ahlinya memang. Kemudian ditentukan memang mi bahannya dan mendata berapa banyak, kemudian di memanfaatkan mi juga sumberdaya masyarakat dalam bergotong royong bekerja sama.”⁷⁵

⁷⁴ Abdullah (44 tahun), Anggota BPD Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Senin 28 Agustus 2023.

⁷⁵ Hamran (31 tahun), Sekertaris Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Senin 28 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasannya sosialisasi terkait dengan rencana kerja pelaksanaan pembangunan dan kegiatan desa di informasikan melalui pertemuan, dan musyawarah yang dilakukan baik itu kelompok maupun musyawarah lingkungan.

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama beberapa masyarakat mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai rencana kerja pelaksanaan pembangunan yakni Bapak Ramli dan Ibu Risna mengatakan bahwa:

“Iye kalau sosialisasi belum pernah tapi ada ji biasa na sampaikan kepala dusun melalui pengumuman di masjid terkait informasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.”⁷⁶

“Iye, kalau ada perkumpulan atau semacam pesta biasa na sampaikan ji pemerintah kalau mau adakan gotong royong dan mudah sekali mi juga informasi tersebar karena ada mi rojer.”⁷⁷

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah desa belum pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait rencana kerja pelaksanaan pembangunan yang ada di desa hoyane melalui musyawarah dan pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa akan tetapi pemerintah desa menginformasikan apabila ada pertemuan di suatu pesta atau sebagainya. Dalam wawancara bapak Sudirman selaku mantan kepala Dusun Pattahe, yang mengatakan bahwa:

“Setau saya selama ini belum pernah pemerintah terjun langsung mensosialisasikan program kerjanya karna aparat desa saja belum pernah disosialisasikan di masyarakat pattahe, makanya sejumlah aparat desa itu belum di tau siapa-siapa semua aparat desanya. Saya sendiri saja hanya kepala desa ji, sekdes dengan toko pembangunan, itupun kami ketahui dari

⁷⁶ Ramli (49 tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Kamis 17 Agustus 2023.

⁷⁷ Risna (39 tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Selasa 15 Agustus 2023.

luar. Nah, bagaimana mau mensosialisasikan program pembangunannya kalau dari hal kecil saja tidak dibicarakan kemasyarakat.”⁷⁸

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kedekatan pemerintah dan masyarakat tidak baik maka hal ini merupakan salah satu penghambat terealisasinya suatu program karena kurangnya sosialisasi/komunikasi. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan terhadap masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam proses pembangunan desa.

Dalam pengawasan dan pemantauan kerja pelaksana pembangunan infrastruktur desa, sudah pasti terlibat dikarenakan sudah menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan, namun masyarakat masih tidak mengetahui akibat kurangnya pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri. Sesuai dengan wawancara yang saya lakukan kepada bapak Abdullah selaku anggota BPD mengenai pengawasan yang ia lakukan selama ini, yang mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan apa yang ku dapatkan di lapangan banyak memang program yang na adakan pemerintah desa di setiap dusun seperti jalan tani, rabat (jalan desa), drainase. Akan tetapi tidak ada RAP atau tanda bukti untuk setiap program yang di realisasikan. Dan kendala yang dihadapi adalah tenaga- tenaga di setiap dusun yang kurang menyetujui adanya program yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan adanya cerita yang kurang baik dari masyarakat tentang program yang akan di laksanakan karena kurangnya komunikasi.”⁷⁹

Hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa program SDGs yang diprogramkan oleh pemerintah desa hoyane lumayan banyak, namun sejauh pengamatan peneliti hingga saat ini, program yang ada masih banyak belum

⁷⁸ Sudirman (51 tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Kamis, 24 Agustus 2023.

⁷⁹ Abdullah (44 tahun), Anggota BPD Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Senin 28 Agustus 2023.

terrealisasikan. Sehingga hal ini mengundang cerita yang tidak baik dari masyarakat. Maka diperlukan upaya yang lebih intens dari pihak pemerintah dalam menanggulangi pembangunan yang ada di Desa Hoyane.

Dengan adanya program SDGs Desa yang mengeluarkan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh desa-desa di Indonesia, perasaan kekurangan atau kemiskinan yang dirasakan oleh warga Desa Hoyane dapat teratasi secara maksimal dengan memberikan jaminan-jaminan penghidupan dan program yang mampu meningkatkan taraf penghidupan masyarakat Desa Hoyane.

Tabel 1.6 Bentuk Program SDGs Desa

No	Program SDGs Desa	Bentuk Program	Waktu	Sumber Bantuan
1	Desa Tanpa Kemiskinan (1)	- BLT-DD - PKH	2018-2023	Dana Desa
2	Desa Tanpa Kelaparan (2)	Bantuan Makanan Tambahan (Sembako)	2020	Dana Desa
3	Desa Sehat Sejahtera (3)	Memaksimalkan kinerja tenaga kesehatan dan menghadirkan bidan di Desa	2021	Dana Desa
4	Pendidikan Desa Berkualitas (4)	- Mendorong tenaga honorer dan sarjana pendidikan untuk meningkatkan pendidikan di tingkat SD dan SLTP	2021	Dana Desa
5	Desa Layak Air Bersih dan Sunitasi (6)	- Perpipaan air bersih - Drainase	2021	Dana Desa
6	Infrastruktur Desa	- Bantuan Rabat di Dusun - Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2021	Dana Desa

7	Budaya Desa Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan fasilitas rumah pandai besi - Membangun sanggar seni dan budaya 	2021	Dana Desa
---	---------------------	--	------	-----------

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa program SDGs Desa yang sementara dijalankan di Desa Hoyane yang memiliki bentuk sebagai berikut:

a. Program Tanpa Kemiskinan

Dalam program tanpa kemiskinan memiliki dua bentuk yaitu BLT-DD dan PKH dimana sumber dana yang di berikan melalui dana. Sejak tahun 2017 pemerintah pusat telah memberikan bantuan dana terhadap desa yang disebut sebagai Dana Desa (DD), yang mana selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Begitu juga dengan dana desa yang didapatkan oleh Desa Hoyane. Namun, hal ini tidak turut memperbaiki kualitas pembangunan dan sosial di Desa Hoyane dalam kenyataannya masih banyak program pembangunan yang belum terealisasi, oleh sebab itu kenyataan ini mengimplikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam penggunaan dana desa, sehingga perbaikan kehidupan bagi masyarakat masih ada yang belum tercapai secara maksimal.

Sesuai arahan Menteri Desa yang mengatakan bahwa dengan kehadiran SDGs Desa jelas ditujukan untuk membantu dana desa agar bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat, khususnya pada golongan terbawah. Sesuai arahan presiden, dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan SDM desa.⁸⁰

Program bantuan yang telah dihadirkan oleh pemerintah desa untuk mengatasi kemiskinan hanya, BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) dan PKH (Program Keluarga Harapan) untuk mengurangi masyarakat yang kurang

⁸⁰ Kemendes PDPT, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa," Tahun 2021, Indonesia.

mampu/miskin dan membantu meringankan sedikit dari beban mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Ayu Andira, yang mengatakan bahwa:

“Kalau soal bantuan hanya BLT-DD ji yang ku dapat itupun ta berapaji, paling banyak mi itu 400.000 pertiga bulan. Itupun ta’ sebentar sekali ji na habis karena manapi kebutuhan dapur na ditau mi juga harga barang disini mahal sekali, jadi wajar kalau cepat habis. Kalau untuk membantu alhamdulillah terbantu ji tapi yah begitu mi, apalagi suamiku tukang ojek ji, jadi kalau ada bantuan saya dapat biasa bikin kue ka trus ku jual nah kalau ada untungku itu biasa ku pake beli kebutuhan- kebutuhan yang ku perlukan.”⁸¹

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari dana desa. Bantuan ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu/miskin. BLT-DD adalah program yang berfungsi sebagai pemberi jaminan bagi masyarakat dalam menggunakan dana yang tersedia untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan, selain itu BLT-DD juga berpotensi meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat sebagai sarana persuasi. Dana yang diterima masyarakat kurang lebih Rp. 300.000- 400.000,- per tiga bulan selama satu tahun, dengan jumlah penerima bantuan BLT-DD dan PKH yaitu 215 orang. Dalam pencapaian SDGs progres dari program tanpa kemiskinan tersebut sebesar 62,20%.

b. Program Tanpa Kelaparan

Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik. Kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dalam jangka panjang dan akan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Dari penyebab terjadinya kelaparan adalah berupa

⁸¹ Ayu Andira (27 Tahun), Ibu Rumah Tangga (Masyarakat Desa Hoyane), Wawancara, Hoyane, Jum’at 25 Agustus 2023.”

kemiskinan, dimana tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, dan hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar di dunia.

Tujuan SDGs Tanpa Kelaparan yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan prioritas pembangunan yang termaktub ke dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Dalam program SDGs yang diterapkan di Desa Hoyane yaitu bantuan makanan tambahan (Sembako).

Bantuan makanan tambahan dapat membantu masyarakat dalam hal kesediaan bahan pokok makanan, namun sama seperti BLT-DD yang hanya bertahan dalam hitungan hari saja. Pada bantuan makanan tambahan tersebut meski belum dapat membantu masyarakat dalam jangka waktu yang lama akan tetapi bisa memberikan tambahan dalam kebutuhan rumah tangga. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ester:

“Iye, alhamdulillah ada ji ku dapat bantuan dari pemerintah dan itu bantuannya berupa sembako ji tidak dapat ka bantuan lain kayak BLT-DD atau PKH. Tapi bantuan ini kurasa lebih dari cukup untuk membantu kebutuhan di dapur.”⁸²

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Tujuan program SDGs Desa yang ke-2 progres dari program tanpa kelaparan dapat dikatakan sudah mencapai 50% dalam pencapaian SDGs.

c. Desa Sehat Sejahtera

⁸² Ester (53 Tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Kamis, 31 Agustus 2023

Tujuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupan warga desa yang sehat demi terwujudnya kesejahteraan. Tujuan ini menyaratkan tersedianya akses yang mudah terhadap layanan kesehatan bagi warga desa. Untuk itulah, dalam rangka mencapai tujuan SDGs Desa tersebut, pemerintah desa dan supra desa harus menjamin tersedianya: akses warga desa terhadap layanan kesehatan; terjangkaunya jaminan kesehatan bagi warga desa; menurunnya angka kematian ibu (AKI); angka kematian bayi (AKB); peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi; prevalensi pemakaian kontrasepsi; pengendalian penyakit HIV/AIDS, TBC, obesitas, malaria, kusta, filariasis (kaki gajah); pengendalian penyalahgunaan narkoba, serta menurunnya angka kelahiran pada usia remaja.

Bentuk program SDGs yang di terapkan di desa hoyane adalah bantuan menghadirkan bidan desa. Program ini sangat dibutuhkan karena di desa hoyane sangat minim tenaga kesehatan dan melihat jangkauan untuk berobat ke rumah sakit sangat jauh sehingga hal ini perlu untuk di perhatikan oleh pemerintah desa agar dapat menghadirkan tenaga perawat di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Maing dalam wawancaranya yaitu:

“Kalau tenaga perawat ada ji 1 orang tapi masih kurang sekali malahan bisa dibilang tidak ada karena pernah sakit ka tapi tidak ada obat di bidan jadi ku pesan di tukang ojek itupun lama baru ada karena di taumi bagaimana keadaan jalannya yang kurang bagus. Jadi itu mi kubilang harusnya tenaga perawat ini dimaksimalkan desa karena jauh ki dari rumah sakit.”⁸³

Hal tersebut sejalan dengan tanggapan Ibu Nurbaiti selaku masyarakat Desa Hoyane, yang mengatakan bahwa:

⁸³ Maing (58 tahun), Masyarakat Hoyane, Wawancara, Hoyane, Senin, 24 Agustus 2023.

“Susah sekali ki cari obat di sini, apalagi kalau habis stoknya bidan biasa ki mau cari di warung/ kios tapi takut ki juga karena bukan resep dari dokter atau tenaga kesehatan. Jadi kalau sakit parah ki biasanya orang di tandu mija karena, kalau di bonceng akan kesakitan.”⁸⁴

Dari wawancara di atas, sesuai dengan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa memang sudah sering orang ditandu untuk mencari pengobatan ke rumah sakit Ibu Kota Kabupaten, dan pernah ada kejadian seorang ibu hamil ditandu meninggal di tengah perjalanan menuju rumah sakit dengan jarak 43 km dari Desa Tanamakaleang sampai ke Dusun Palandoang dan di jemput ambulance dari Dusun Palandoang sampai ke Rumah Sakit Masamba yang jaraknya kurang lebih 127 km. Hal ini sangat perlu untuk dibenahi karena salah satu kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya fasilitas kesehatan serta kesehatan ibu hamil atau anak pada usia di bawah lima tahun.

Sesuai pengamatan yang peneliti dapatkan di lapangan memang betul adanya masalah tenaga kesehatan yang masih sangat kurang khususnya di Desa Hoyane. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi masalah yang terjadi pihak pemerintah merupakan ujung tombak dalam memberikan perhatian terhadap infrastruktur yang ada agar dapat direalisasikan sehingga proses pengobatan masyarakat tidak memungut biaya yang banyak dan dapat disesuaikan dengan kemampuannya. Hal ini menjadi pelajaran bagi pemerintah bahwa seorang pemimpin sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakatnya oleh karena itu, pembenahan infrastruktur sangat diperlukan di Desa Hoyane agar masyarakat dapat sejahtera dalam segi kesehatan. Dan untuk merealisasikan suatu program SDGs sangat diperlukan kerjasama masyarakat agar ikut berpartisipasi

⁸⁴ Nurbaiti (48 Tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Senin, 24 Agustus 2023.

dalam program SDGs yang di programkan oleh Pemerintah Desa sehingga masalah yang terjadi tidak terulang kembali.

d. Pendidikan Desa Berkualitas

SDGs Desa Peduli Pendidikan berupaya meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin desa, menjamin akses warga desa terhadap pelayanan dasar, serta melindungi seluruh warga desa dari segala bentuk bencana Pendidikan menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama-sama dengan supra desa harus memastikan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas bagi warga desa, agar aksesnya mudah bagi warga terhadap layanan pendidikan.

Untuk mencapai tujuan SDGs Desa Pendidikan Desa Berkualitas, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan dari supra desa adalah akses warga terhadap layanan pendidikan terakreditasi. Tujuan ini berfokus pada tersedianya layanan pendidikan keterampilan bagi warga desa agar desa tidak tertinggal dalam segi pendidikan. Namun hal ini terbanatah dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Jafar selaku guru honorer di SD 245 pattahe yang mengatakan bahwa:

“Kalau dinilai pembangunannya sebenarnya masih sangat kurang karena dalam satu ruangan itu di bagi menjadi dua kelas mana mi fasilitas belajrnya kurang memadai. Dan tenaga pendidiknya masih sangat kurang apalagi di SD, biasanya mereka dalam seminggu hanya 3 kali belajar, dan hanya datang to’ saja ke sekolah na kalau tidak ada guru langsung pulang ji.”⁸⁵

Dari wawacara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa diperlukan upaya yang lebih intens dari pihak pemerintah dalam menanggulangi permasalahan

⁸⁵ Abdul Jafar (27 Tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Rabu, 30 Agustus 2023.

pendidikan yang ada di Desa Hoyane karena jika dilihat dari segi kemajuan suatu desa yang dinomorsatukan adalah pendidikan. Maka pendidikan di Desa Hoyane masih membutuhkan perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan ditingkat SD dan SLTP.

e. Desa Layak Air Bersih dan Sunitasi

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Pada sektor lingkungan hidup yang merupakan salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak masih menjadi problem di seluruh dunia. Karena itulah, pemenuhan atas kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tercapainya tujuan SDGs Desa dapat dilihat melalui rumah tangga terhadap beberapa hal, diantaranya akses rumah tangga terhadap air minum dan sunitasi layak, efesiensi penggunaan air minum, dan adanya kegiatan melindungi ekosistem, yaitu pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

Menurut data BPS tentang presentase akses rumah tangga terhadap air minum layak di pedesaan pada tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Di tahun 2018, presentase akses rumah tangga terhadap sunitasi layak tercatat sebesar 55,74%, lalu meningkat pada tahun 2020 dengan angka 71,17%.

Agar akses runah tangga terhadap air minum konsisten naik, maka pemerintah Desa Hoyane memiliki bentuk strategi program dari desa layak air bersih dan sunitasi, dua diantaranya; perpipaan air bersih dan pembangunan drainase. Program perpipaan air bersih di Desa Hoyane hingga saat ini belum ada.

Hal ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan hendaknya di prihatin.

Seperti yang dikatakan oleh Sumiati selaku masyarakat Desa Hoyane:

“kalau bahas ki masalah air, saya mi yang sanagat menderita karena susah sekali biasanya kalau mau ka memasak harus ka ambil air dulu di rumahnya tetangga, itupun susah karena pake jergen jiki angkut i. Pernah jika dengar kalau mau adakan pembangunan air bersih tapi sampai sekarang belum ada.”⁸⁶

Tujuan dari proram air bersih dan sunitasi ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat, akan tetapi hingga saat ini dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat setempat. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Naris bahwa:

“Jujur saja agak kecewa ka karena kemarin sempat diumumkan kalau mau diadakan pembangunan air bersih tapi tidak jadi-jadi sampai sekarang malahan kayak di hilangkan mi sedangkan penduduk na tunggu-tunggu sekali mi ini pengadaan air bersih.”⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa air bersih di Desa Hoyane masih sangat kurang dan perlu untuk diperhatikan. Melihat dari beberapa curhatan masyarakat dan yang peneliti lihat di lapangan pembenahan air bersih tentu menjadi masalah dalam mewujudkan tujuan dari SDGs Desa karena masih banyak warga yang kekurangan air dan hal ini perlu untuk ditindak lanjuti karena pada dasarnya air bersih itu adalah kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidupnya. Maka perlu adanya upaya dalam merealisasikan program tersebut yaitu dengan memberikan effort untuk membuat suatu perairan yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat sehingga dapat memberikan dampak positif.

⁸⁶ Sumiati (38 Tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Kamis 31 Oktober 2023.

⁸⁷ Haris (47 Tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Rabu 30 Agustus 2023.

Sedangkan pada program drainase juga memberikan dampak positif terhadap warga akan tetapi program drainase tersebut adalah program desa sebelumnya. Jika melihat program drainase desa sekarang belum ada yang berdampak pada masyarakat karena belum terealisasi sampai saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rian bahwa:

“Kalau pembangunan drainase memang ada nampak di lihat disetiap Dusun tapi itu bukan program pembangunannya desa sekarang, tapi programnya desa yang kemarin.”⁸⁸

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program pembangunan di desa hoyane 90% adalah program lanjutan dari desa sebelumnya. Hal ini perlu untuk diperhatikan karena keinginan yang di harapkan adalah inovasi baru yang dihadirkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat agar desa hoyane tidak tertinggal dalam segi pembangunan.

f. Inovasi dan Infrastruktur Desa

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif, maka keadaan infrastruktur desa sangat menentukan kesejahteraan masyarakat mulai dari infrastruktur desa seperti jalan prosos desa, jalan kecamatan, maupun infrastruktur lain yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat seperti infrastruktur dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor lainnya.

Program Inovasi Desa (PID) dapat diartikan sebagai salah satu upaya pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa yang terfokus dalam 3 sasaran program diantaranya

⁸⁸ Rian (30 Tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Selasa, 29 Agustus 2023.

pengembangan wirausaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengadaan infrastruktur desa.

Tujuan utama Program Inovasi Desa Menurut Kepmen Desa PDTT No. 48 Tahun 2018 adalah untuk mendorong pembangunan Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif & peka terhadap kebutuhan masyarakat desa sehingga dalam hal ini, upaya ini dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian desa. Untuk mencapai keberhasilan dari inovasi tersebut Pemerintah Desa Hoyane menggunakan program SDGs diantaranya; bantuan rabat dusun dan bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

Bantuan RTLH atau program Rumah Tidak Layak Huni ialah program bagi masyarakat umum yang memiliki rumah tidak layak huni dengan cara memberikan bantuan seperti beda rumah. Adapun besar bantuan yang diberikan tergantung berapa anggaran dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan dana desa. Bapak Opniel selaku kaur pemerintahan Desa Hoyane menjelaskan bahwa:

“Program RTLH ini memang program bantuan untuk masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak di tempati. Akan tetapi Pemerintah Desa mengadakan pengecekan terlebih dahulu baru diajukan RTLH untuk dilakukan bedah rumah bagi warga yang tergolong tidak layak huni rumahnya.”⁸⁹

⁸⁹ Opniel (29 Tahun), Kaur Pemerintahan Desa Hoyane, Wawancara, Senin, 28 Agustus 2023.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam merealisasikan program RTLH ini diperlukan adanya upaya dalam menekan proses pembenahan program ini agar terhindar dari ketidak maksimalnya suatu kinerja dengan demikian diharapkan dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Marce selaku masyarakat Desa Hoyane yang mendapatkan bantuan RTLH:

“Mungkin ini berkat dari tuhan karena jujur tidak ku percaya akan dapat ka bantuan ini karna biasanya hanya ku lihat ji di tv jadi tidak kusangka akan dapat ka juga. Untuk bantuan ini kurasa sangat membantu karena tidak perlu mika lagi keluarkan biaya yang banyak untuk perbaiki rumah.”⁹⁰

Hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa program RTLH cukup membantu masyarakat baik dari segi pembangunan maupun bantuan lainnya. Hal ini perlu untuk di tingkatkan agar masyarakat dapat merasakan hasil dari program SDGs Desa.

Program pembangunan rabat dusun merupakan hal yang sangat penting bagi kebutuhan masyarakat Desa Hoyane. Seperti yang di katakan oleh Bapak Ansar selaku masyarakat dusun pattahe:

“Semenjak adanya program rabat dusun, sampai saat ini belum ada yang terlihat atau nampak di desa. Karena yang kulihat dan yang kurasakan itu dampaknya rabat dari program desa sebelumnya yang masih na rasakan masyarakat sampai sekarang.”⁹¹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program ini sangat dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari SDGs, oleh karena itu dengan adanya rabat dusun warga dapat dengan mudah mengakses hasil perekonomiannya.

⁹⁰ Marce (64 tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Selasa, 29 Agustus 2023.

⁹¹ Ansar (32 Tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Jum'at, 25 Agustus 2023.

Seperti yang kita baca sesuai dengan wawancara di atas dan pengamatan peneliti progres pembangunan rabat dusun memang belum memberikan dampak positif karena program rabat dusun ini belum terealisasikan dan perlu untuk pembenahan lebih lanjut.

g. Budaya Desa Adaptif

Untuk mencapai tujuan SDGs Desa ini, digunakan beberapa indikator di antaranya lestariannya kegiatan mengajar, partisipasi tokoh agama dalam kegiatan pembangunan desa, perlindungan warga desa terhadap pelestarian budaya desa, serta penyelesaian masalah warga berdasarkan pendekatan budaya.

SDGs Desa berusaha untuk mempertahankan kearifan lokal dan melakukan revitalisasi serta menggerakkan seluruh elemen lembaga di tingkat desa. Karena, keterlibatan dan fungsi dari elemendesa sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini akan menjadi penopang kehidupan kebhinekaan di desa yang dinamis, serta mendorong terapainya SDGs Desa. Dalam mendukung SDGs Desa pemerintah desa mengeluarkan bentuk program dari SDGs Desa yaitu; Pelaksanaan MusDes (Musyawarah Desa), tersedia dokumen RPJMDES dan RKPDES, APBDES, serta Peta Desa dan Profil Desa.

Dari pembangunan desa yang sejatinya hanya diperuntukkan untuk masyarakat agar dapat sejahtera dalam bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh bapak Hamran, yang mengatakan bahwa:

Sebenarnya, dalam pembangunan di Desa Hoyane kami sadari ji memang masih kurang. Bukan berarti kami tidak mau membangun infrastruktur di desa. Tapi karena kurangnya peralatan yang dipakai dalam pengelolaannya, jadi tidak berjalan ki dengan baik.⁹²

⁹² Hamran (31 tahun), Sekertaris Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Senin 28 Agustus 2023.

2. Implementasi SDGs dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Sosial di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dengan tanda dari suatu keadaan tertentu yang di anggap kurang dikehendaki menuju ke suatu keadaan teretentu yang di kehendaki. Bila pemahaman tersebut diaplikasikan di desa maka pembangunan desa merupakan perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi tertentu yang dinilai kurang baik, kearah yang lebih baik atau lebih diinginkan.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu kawasan wilayah. Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan yang tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolak ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat. Keterkaitan fungsi diantara infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya.

Program baru bernama SDGs Desa yang dicanangkan oleh Kementerian Desa dalam Permendes no 13 tahun 2020, bertujuan untuk menjadi dasar pembangunan desa yang berkelanjutan. Program SDGs Desa diutamakan sebagai program pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh Dana Desa.⁹³ Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Iskandar pada tahun 2021, terungkap bahwa SDGs Desa memberikan andil sebesar 74% dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.⁹⁴ Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, Desa Hoyane melaksanakan program SDGs Desa melalui potensi desa yang dapat mendukung ekonomi dan sosial yang mereka miliki.

Tabel 1.7 SDGs dalam Mendukung Ekonomi dan Sosial

No	Bentuk Program SDGs di Desa Hoyane	Ekonomi	Sosial
1	BLT-DD	✓	✓
2	PKH	✓	✓
3	Bantuan Makanan Tambahan (Sembako)	✓	✓
4	Perpipaan Air Bersih		✓
5	Drainase		✓
6	Bantuan Jembatan		✓
7	Bantuan Rabat di Dusun	✓	✓
8	Bantuan Jalan	✓	✓
9	Pelaksana MusDes		✓
10	Tersedia Dokumen RPJMDES dan RKPDES		✓
11	APBDES		✓
12	Peta Desa dan Profil Desa		✓

⁹³ Asis Sustiawan, "Efektivitas Program Sdgs Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ngabar Ponorogo" (Tesis, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022), 61.

⁹⁴ Roberta Zulphi Surya, "Analisa Keselarasan SDGs Dengan Program Pembangunan Desa Seresam Di Desa Seresam Di Kabupaten Indragiri Hulu," *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 5, no. Nomor 2 (9 Desember 2019): 79, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v5iNomor>.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bentuk program SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa yang di terapkan di Desa Hoyane dapat mendukung dari segi Ekonomi dan Sosial. Dalam tabel dapat di jabarkan sebagai berikut:

a. Ekonomi

Dari segi ekonomi ada lima bentuk program SDGs Desa yang diterapkan di Desa Hoyane masuk kedalam aspek ekonomi antar lain; BLT-DD, PKH, Bantuan makanan tambahan (Sembako), Bantuan rabat di dusun, dan Pembangunan jalan antar desa. BLT-DD dan PKH dapat membantu masyarakat dalam meringankan sedikit beban dari masyarakat yang menerima bantuan tersebut, walaupun tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara menyeluruh. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Muhammad Imran bahwa:

“Ada bantuan ku dapat seperti BLT-DD atau PKH, bantuan ini memang tidak seberapa tapi bisa ji na bantu dalam hal segi perekonomian walaupun tidak sepenuhnya, apalagi kan untuk sekaran ini kurang sekali mi lagi buahnya coklat, malahan ada yang tidak berbuah mi, na itu ji salah satu mata pencahariannya masyarakat disini.”⁹⁵

Wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi program yang dapat membantu mendukung perekonomian seperti BLT-DD dan PKH dalam segi ekonomi meski belum sepenuhnya, akan tetapi dengan adanya bantuan tersebut masyarakat dapat bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan. Seperti yang kita ketahui bahwa memenuhi kebutuhan hidup adalah tugas setiap orang, demi menunjang dan bertahan hidup. Bantuan RTLH ialah sebuah program bantuan untuk masyarakat yang memiliki rumah tetapi tidak layak huni

⁹⁵ Muhammad Imran, S. Pd (30 tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Jum'at 25 Agustus 2023.

dengan cara memberikan bantuan seperti bedah rumah. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Domingus C Pawongan bahwa:

“Kami coba membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat kabupaten untuk kemudian membantu warga kita supaya mereka ada hasil tidak lagi terfokus pada bagaimana membangun kebutuhan pokok mereka seperti rumah sebagaimana satu tahun ini ada dua kegiatan yang masuk untuk membantu warga yang layak untuk dibantu seperti bedah rumah, dan sudah ada beberapa warga yang mendapatkan supaya agak meringankan beban mereka.”⁹⁶

Sesuai wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari SDGs adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti amati bahwa bedah rumah adalah salah satu program dalam menanggulangi kebutuhan vital yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap masyarakatnya.

b. Sosial

Dari segi sosial dapat dijabarkan terdapat dua belas bentuk program SDGs Desa yang diterapkan di Desa Hoyane masuk kedalam aspek sosial antar lain: BLT-DD, PKH, Bantuan makanan tambahan, Drainase, Kesehatan, Bantuan Jembatan, Bantuan Rabat di Dusun, Pembangunan Jalan, Bantuan RTLH, Pelaksana MusDes, Tersedia Dokumen RPJMDES dan RKPDES, Peta Desa dan Profil Desa.

Berdasarkan bentuk program SDGs Desa yang diterapkan di Desa Hoyane, yang dimana program ini mendukung ekonomi dan sosial. Pada dasarnya SDGs dengan tujuan utamanya adalah tanpa kemiskinan. Dengan adanya program SDGs Desa kemiskinan yang ada di desa dapat teratasi secara menyeluruh namun membutuhkan proses dalam hal penyelesaiannya.

⁹⁶ Domingus C Pawongan (40 tahun), Kepala Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Senin 28 Agustus 2023.

Namun dalam proses implementasi suatu pembangunan sering terhambat, karena sering kita jumpai adanya hambatan-hambatan, terlepas dari itu sama halnya dengan pembangunan infrastruktur di Desa Hoyane dalam pengimplementasiannya juga menjumpai beberapa hambatan. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor penghambat berjalannya program tersebut yaitu diantaranya: Keterbatasan anggaran, dan tidak terjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan Anggaran merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penghambat ketidak optimalan implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Hoyane. Seperti yang dituturkan oleh Donal Dores dalam wawancara peneliti dengan beliau bahwa:

“Memang dalam implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Hoyane ini terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, “Jadi, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang menjadi kendalanya itu keterbatasan anggaran, namun faktor yang paling berpengaruh yaitu masalah warga, dan ada beberapa diantara seperti misalnya masyarakat yang tidak mau bersatu, itu dilihat ketika diadakan gotong royong setiap minggu hanya beberapa jiwa masyarakat yang ikut serta yang lainnya sibuk dengan urusan pribadinya padahal gotong royong itu untuk kenyamanan kita bersama trus keterlibatannya juga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini masih kurang dan harus ditingkatkan.”⁹⁷

Dari hasil wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi kendala utama dalam program pemerintah adalah keterbatasan anggaran, namun hal diatas dapat terbantahkan jika kita melihat ADD yang mana ADD ini di alokasikan dengan melihat luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kemiskinan suatu daerah jika suatu wilayah luas maka ADD nya juga akan tinggi karena sekarang ini kita mengenal istilah membangun Indoensia dari desa kalau desa

⁹⁷ Donal Dores (44 tahun), Kaur Pembangunan Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, 23 Agustus 2023.

maju maka Indonesia akan maju dan kenapa Indonesia harus maju? Indonesia harus maju karena sekarang ini ADD sudah tinggi.

Untuk masalah pendanaan masih menjadi pokok permasalahan yang ada, dimana Desa tidak memiliki lokasi yang tepat bagi anggaran yang dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena masing-masing anggaran tersebut sudah memiliki posisi, sehingga penggunaannya belum maksimal. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sudirman dalam wawancaranya, yang mengatakan bahwa:

“Mengenai pembangunan desa selama ini mane dua i ti ku issang nampak yaitu jalan tani dan jembatan, selain itu hurai kuissang itupun kita tidak tau berapa anggarannya sementara desa-desa terdahulu itu dipaparkan anggarannya. Dan pendapatku mengenai pembangunan disini tentu masih sangat kurang. Mengenai pembangunan jalan tani yang punya anggaran itu orang palepuang peteng dan swadaya itu pattaahe, meteng dalang mao kati jalan tani yang kita rawat swadaya semua punya anggaran dia peteng ah da ise makkama. Seperti di haung hulo tawaran pertama itu orang pattahe mau kerja tapi setelah final ternyata orang di atas yang kerjai, makanya tidak ikut ka ke lokasiku pas dikerja karena kecewa ka sedikit, karena pembicaraan pertama ditawarkan pak sekdes seharusnya dusun pattahe yang kerja.”⁹⁸

Wawancara di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa dari beberapa program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa, sejauh ini terdapat dua pembangunan yang nampak yaitu jalan tani dan jembatan. Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan peneliti hal ini benar adanya dan tentu masih sangat kurang jika kita melihat kondisi desa yang sekarang perlu untuk di benahi agar desa tidak tertinggal dalam segi pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengimplementasikan suatu pembangunan desa.

⁹⁸ Sudirman (48 tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Rabu 23 Agustus 2023.

Komunikasi yang baik mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran tugas pemerintahan termasuk didalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa terjalannya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah maka akan sangat sulit untuk diketahui apa yang telah dicapai, apa yang akan diraih serta kendala-kendala apa yang di hadapai dalam suatu pekerjaan. Dan komunikasi adalah sumber informasi dari pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut di perjelas oleh wawancara penulis dengan salah satu informan penulis yaitu:

“Sebenarnya satu ji kunci terciptanya kelancaran pembangunan di desa ta’ ini ji komunikasinya pemerintah ke masyarakat yang harus na perhatikan supaya kalau menyampaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembangunan yang mau na laksanakan, masyarakat juga bisa turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan di desa ini.”⁹⁹

Dari hasil wawancara di atas, yang menerangkan bahwa adanya ketidak lancaran komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat menjadi salah satu faktor terhambatnya implementasi pembangunan di Desa Hoyane yang dimana pemerintah desa tidak menyampaikan informasi atau kurangnya sosialisasi kepada msyarakat. Dalam hal ini penulis menemukan fakta menarik bahwa yang menjadi pemicu ketidak lancaran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Desa Hoyane berawal dari adanya pemilihan kepala desa pada tahun 2021 silam yang dimana dalam pemilihan itu ada pro dan kontra terhadap calon terpilih hingga berdampak pada adanya ketidak stabilan hubungan antara kepala desa menjabat serta komunikasi yang tidak lancar.

⁹⁹ Haidil, S.P (33 tahun), Masyarakat Desa Hoyane, Wawancara, Hoyane, Jum’at 25 Oktober 2023.

Masyarakat memiliki peranan penting dalam implementasi program SDGs, termasuk dalam bidang pembangunan infrastruktur, salah satu peran masyarakat dalam pembangunan yaitu dengan memanfaatkan dan memelihara infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga infrastruktur tersebut tidak cepat rusak yang nantinya akan direnovasi ulang dan memakan biaya. Adapun yang menjadi penghambat implementasi pembangunan Desa Hoyane yaitu :

1. Kurangnya kepedulian pemerintah dalam pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara nyata dan positif terhadap penyusunan perencanaan dan implementasi pembangunan di daerah. Masyarakat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi, dan keinginan kelompok ke masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diawali oleh adanya sosialisasi yang optimal dari pihak- pihak yang bertanggung jawab (pemerintah Desa) tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor dalam implementasi pembangunan karena sangat mempengaruhi kelancaran suatu program serta kepedulian masyarakat terhadap infrastruktur yang telah disediakan pemerintah juga menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya pembangunan di Desa Hoyane karena kurang mensosialisasikan program yang akan di laksanakan.

2. Konstruksi bangunan yang kurang bagus.

Konstruksi bangunan sangat mempengaruhi kualitas dari sebuah bangunan, jika konstruksi sebuah bangunan baik maka bangunan tersebut akan bertahan lama (awet). Hal ini tidak terlihat pada konstruksi bangunan jalan yang ada di Desa Hoyane. Jalanan yang ada hanya disemen dengan tinggi sekian centi meter (tipis) sehingga setahun terkena hujan semena sudah hilang semua dan kondisi jalannya berlobang, retak dan batunya terhambur.

C. Pembahasan

1. Bentuk Implementasi Program SDGs oleh Pemerintah Desa Hoyane dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara

Dalam implementasi *sustainable development goals* diperlukan adanya ketersediaan sumber daya alam dan dukungan dari Pemerintah Desa untuk melancarkan sebuah proses pembangunan yang ada. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan maka penulis akan menunjukkan hasil yang sesuai dengan kondisi dilapangan, maka dari itu penulis akan menjelaskan bagaimana bentuk implementasi program SDGs yang ada di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.

Hal ini terlihat dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum. Dalam perencanaan pembangunan tercantum bahwa kelompok sasaran pembangunan berkelanjutan adalah masyarakat. Selain itu, prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yaitu

dimanfaatkan untuk menggali potensi-potensi dan mengurangi angka kemiskinan di desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan memberikan berbagai bantuan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, adanya implementasi *Sustainable Development Goals* dalam perwujudan untuk memenuhi kepentingan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Grindle dalam bahwa: Keberhasilan atau kegagalan suatu pembangunan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Suatu pembangunan akan berhasil apabila mendapat dukungan luas dari masyarakat sebagai kelompok sasaran dari adanya program pembangunan tersebut.

Pemerintah Desa menerapkan 12 bentuk program dari ke 7 tujuan SDGs untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Adapun pembahasan dari ke 7 tujuan SDGs ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menjelaskan bahwa:

a. Desa Tanpa Kemiskinan

Dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa program BLT-DD dan PKH Rp. 300,000-400,000 pertiga bulan yang jumlahnya hanya mencukupi kebutuhan sesaat, sedangkan jumlah penerima yaitu 215 orang. Jika dibanding dengan KK yang masuk dalam kategori miskin masih banyak akan tetapi hal ini dapat menunjukkan bahwa program SDGs untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 45% sudah tercapai dari segi penyaluran bantuan.

b. Desa Tanpa Kelaparan

Dalam tujuan Desa Tanpa Kelaparan, sama halnya dengan pencapaian target SDGs tanpa kemiskinan karena belum berhasil dalam mencapai target SDGs dikarenakan bentuk program tersebut belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masyarakat tidak berpatokan pada bantuan yang disalurkan melainkan mereka lebih dominan untuk bertani agar dapat memberikan penghasilan yang lebih baik, karena dampak alam yang memungkinkan dan mendukung masyarakat dalam hal pertanian .

c. Desa Sehat Sejahtera

Program Desa Sehat Sejahtera memiliki tujuan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Keterbatasan sarana kesehatan dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan sehingga hal ini perlu untuk dibenahi. Dari segi tenaga kesehatan yang ada di Desa Hoyane tentu masih sangat kurang dilihat dari jumlah yang hanya terdapat 1 orang stay di desa dan jika dibandingkan dengan fasilitas di ibu kota kabupaten hanya 5% dari 100% dan tentu program ini belum mencapai target dalam SDGs.

d. Pendidikan Desa Berkualitas

Melihat tujuan SDGs yang keempat bahwa pendidikan adalah wadah yang sangat dibutuhkan di Desa untuk kemudian menjadikan generasinya menjadi pelajar yang dapat berkualitas bagi desa serta bangsa dan negara. Ditinjau dari hasil penelitian maka program ini juga belum bisa mencapai target dari tujuan SDGs. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa pendidikan di Desa Hoyane masih

membutuhkan perhatian baik dari tenaga pengajar dan dukungan fasilitas untuk meningkatkan mutu pendidikan ditingkat SD dan SLTP.

e. Desa Layak Air Bersih dan Sunitasi

Desa Layak Air Bersih dan Sunitasi memiliki 2 bentuk program yaitu Perpipaan Air Bersih, dan Drainase. Kedua bentuk program ini hingga saat ini belum ada yang menapai target SDGs atau dapat dikatakan belum ada yang terealisasikan. Dari hasil penelitian dapat di analisis bahwa program yang tidak terealisasikan seperti bantuan desa layak air bersih belum mampu mencapai target SDGs.

f. Inovasi dan Infrastruktur

Infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Program Inovasi dan Infrastruktur hanya ada dua program yaitu bantuan rabat dusun dan RTLH. Kedua bantuan tersebut hingga saat ini hanya satu yang sementara dalam proses direalisasikan yaitu RTLH sedangkan pembangunan jalan/rabat di Dusun belum dijalankan. Dari program tersebut jika dinilai belum mampu mencapai target karena di lihat dari target SDGs adalah mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur jalan, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

g. Budaya Desa Adaptif

Kelembagaan desa merupakan komponen yang sangat vital untuk mendorong keberlanjutan pembangunan. Karena itulah, keberadaan kelembagaan

Desa harus diperkuat sehingga dapat menopang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa berusaha untuk mempertahankan kearifan lokal, serta melakukan revitalisasi dan menggerakkan seluruh elemen lembaga-lembaga di tingkat desa. Karena, keterlibatan semua elemen desa, kuat dan berfungsinya lembaga di desa dalam kehidupan masyarakat, akan menjadi penopang kehidupan kebhinnekaan di desa yang dinamis, serta pendorong tercapainya SDGs Desa.

Program Budaya Desa Adaptif telah dikeluarkan Pemerintah Desa yaitu; Pelaksanaan MusDes (Musyawarah Desa), tersedia dokumen RPJMDES dan RKPDES, APBDES, serta Peta Desa dan Profil Desa. Dilihat dari kesejahteraan masyarakat saat ini dapat dikatakan sejahtera apabila segala kebutuhan dalam hidupnya terpenuhi akan tetapi program yang sedang berjalan belum sepenuhnya terealisasi, dan pemerintah desa yang hanya berpartisipasi penuh dalam penggunaan dana desa BLT-DD. Sehingga program SDGs ini dapat di katakan belum tercapai.

Pemerintah desa hanya mengandalkan hasil pertanian masyarakat dengan empat bentuk program bantuan untuk masyarakat yaitu: BLT-DD, PKH, Bantuan makanan tambahan (Sembako), dan Bantuan rabat dusun (jalan tani). Jika mengandalkan keempat program tersebut peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak akan berjalan dengan maksimal, karena belum adanya strategi yang dianggap efektif dalam pelaksanaan SDGs Desa sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun demikian bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Dalam suatu pembangunan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi pembangunan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

Dari hasil ke tujuh program SDGs yang diterapkan di Desa Hoyane dapat dinilai sebesar 10%.

2. Implementasi SDGs dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Sosial di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, peneliti menemukan bahwa bentuk program SDGs (*Sustainable Development Goals*) di Desa Hoyane mendukung aspek ekonomi dan sosial dimana bentuk program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian bahwa ada 16 tujuan bentuk program SDGs yang diantaranya 5 bentuk program mendukung aspek ekonomi dan 12 program yang mendukung aspek sosial.

Dengan adanya bentuk program SDGs, pembangunan di Desa lebih terarah, namun arah pembangunan belum dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena program SDGs di Desa Hoyane belum terealisasi dengan baik.

Program SDGs Desa juga memiliki hambatan yang sering muncul di Desa Hoyane antara lain:

- 1) Tidak adanya otonomi di desa, yang menyebabkan desa belum bisa menghasilkan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.
- 2) Kurangnya peralatan yang digunakan dalam proses pembangunan
- 3) Pengimputan data yang sering mengalami keterlambatan akibat jaringan yang tidak mendukung.
- 4) Pemerintah kurang memperhatikan program pembangunan di desa.
- 5) Kurangnya pemahaman relawan SDGs tentang penggunaan aplikasi SDGs.

Dengan demikian, belum memadainya sumber daya yang digunakan dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, maka hal tersebut dikarena masih minimnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana atau implementor sehingga menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kualitas SDM sehingga dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program SDGs Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa.

Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa program SDGs Desa sebagai bentuk tanggungjawab seorang pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SDGs merupakan tujuan pembangunan atau target yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam segi ekonomi, dan sosial. Hal ini dapat dikatakan searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Islam Faruk Zaini, meskipun terdapat perbedaan dalam kata penanggulangan

kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan. Dimana dalam penelitiannya membuktikan bahwa kemiskinan yang terjadi di Desa Wargajaya belum sepenuhnya dapat ditanggulangi karena SDGs masih berada pada tahap awal, dan permasalahan yang di hadapi Desa dalam pelaksanaan SDGs Desa ialah pelaksanaan yang masih belum berjalan dengan baik, terutama pada masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui Program SDGs Desa. Dari hasil analisis Islam Faruk Zaini telah mendukung bahwa program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Hoyane masih minim dan mengalami banyak kendala terutama pada pelaksanaan/pengimplementasiannya.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pembanguna infrastruktur di Desa Hoyane belum terealisasi hingga saat ini dikarenakan adanya pemicu permasalahan yang ada, sehingga dalam penggunaan anggaran desa belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena belum adanya dampak positif yang dirasakan masyarakat. Namun, pemerintah juga mempunyai alasan kenapa program tersebut belum terealisasi. Hal tersebut dikarenakan faktor kurangnya fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam proses pengelolaan seperti bahan semen untuk perbaikan jalan sehingga pembangunan infrastruktur di Desa Hoyane terbengkalai.

Menyadari adanya beberapa hambatan dalam implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Hoyane yang dapat mengganggu jalannya pembangunan dan pemerintahan desa, maka pemerintah desa seharusnya menerapkan beberapa alternatif, seperti:

a. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan

Banyak yang berfikir bahwa transparansi sudah dilakukan dengan menyebarluaskan suatu program kepada masyarakat atau menempelkan pengumuman pada lokasi tertentu yang memungkinkan untuk dibaca oleh sebagian besar komponen masyarakat. Padahal transparansi perlu diadakan sosialisasi tentang maksud dan tujuan serta manfaat program tersebut, di perkirakan jumlah dana yang akan dipakai dan lain sebagainya yang bersifat privasi. Karena jika semua dijelaskan maka akan timbul rasa untuk ikut berperan serta dalam program tersebut.

b. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat

Komunikasi secara tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan melemahkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Jika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak terjalin dengan baik maka seringkali kali masyarakat dan pemerintah tidak sejalan serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa. .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Sustainable Development Goals Desa belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya jangkauan perubahan yang diinginkan, belum mumpuninya pelaksana program, dan belum memadainya sumber daya yang digunakan. Program SDGs Desa dapat membantu arah pembangunan yang lebih jelas, akan tetapi implementasi SDGs di Desa Hoyane belum tercapai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun sudah ada beberapa bentuk program SDGs desa yang dijalankan pemerintah seperti BLT-DD, PKH, RTLH, Bantuan rabat dusun dan Bantuan sembako. Akan tetapi program tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari belum optimalnya infrastruktur di Desa Hoyane khususnya dalam bidang, akses jalan, kesehatan, dan pendidikan, yang sangat diperlukan, melihat anggaran desa yang seharusnya merujuk pada kesejahteraan masyarakat meskipun transparansi masih belum dilakukan pemerintah setempat. Dari penelitian ini juga dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat tentang implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Hoyane sangat mengecewakan. Harapan mereka mengenai pembangunan jauh dari kenyataan. Masyarakat menganggap bahwa anggaran yang sudah di alokasikan untuk pembangunan dapat di nikmati hasilnya, terutama pada

bidang jalanan yang sangat mereka butuhkan yang selama beberapa tahun ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

2. Tujuan program SDGs Desa Hoyane memiliki bentuk program yang mendukung aspek ekonomi dan sosial seperti BLT-DD, PKH, RTLH, Bantuan rabat dusun dan lainnya, namun program tersebut belum dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena program ini secara aplikatif belum terealisasi dengan baik sehingga pembangunan infrastruktur berujung tidak efektif.
3. Dalam perealisasi suatu program pembangunan perlu adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga disetiap pembangunan yang belum terlaksana dapat diberitahukan kepada masyarakat bahwa pembangunan belum optimal dikarenakan adanya kendala yang dihadapi dalam proses perealisasi program SDGs seperti ketersediaan bahan atau fasilitas yang digunakan didalamnya agar masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap kinerja pemerintah, sehingga program tersebut dapat direalisasi dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh tersebut maka peneliti dapat merumuskan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa diharapkan membangun komunikasi yang baik dan memberikan ruang kepada masyarakat serta mendorong kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap program pembangunan dalam

proses pelaksanaan, agar setiap pembangunan dapat berjalan dan tepat pada sasaran.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang diprogramkan oleh Pemerintah Desa dan lebih menjaga setiap sarana prasarana pembangunan yang ada di desa agar dapat bertahan lama.
3. Dalam tahap selanjutnya peneliti diharapkan bisa lebih mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) baik dari segi metode penelitian yang digunakan, pembangunan yang diteliti maupun hambatan atau faktor penyebab tidak optimalnya suatu pembangunan yang menjadi acuan dalam SDGs Desa nantinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2022) “Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqhi”, 1 edition (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 130.
- Afifuddin, and Beni Ahmad Saebani., (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ed. III; Bandung: CV Pustaka Setia), 130.
- Anggito,Albi., and Johan Setiawan. (2018), *Metodologi Pnelitian Kualitatif*, (Ed. I; Sukabumi: CV Jejak), 92.
- Badrudin, Rudy., (2012). *Ekonomi Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 145.
- Bappeda, (2020). “Ekonomi Hijau (Green Ekonomy) untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. <https://bappeda.babelprov.go.id/content/ekonomi-hijau-green-economy-untuk-mendukung-pembangunan-berkelanjutan-di-provinsi-kepulauan>
- Dinas Kominfo., Portal Resmi Kabupaten Luwu Utara, 2018.
- Dwi Anggun Pangestu., (2020), “Analisis Faktor-faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Kemiskinan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Sumatera Selatan”, (Skripsi, Universitas Brawijaya), 2. <https://repository.unsri.ac.id/37088/3>
- E, Murniningtyas., and Alisjahbana, A. S. (2018), *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia ; Vol. III (Issue 2)*,1.
- Fauziah, (2016). “Pemikiran Muhammad Abdullah Al-Buraey Tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Dalam Islam,” [Repository.radenfatah.aceh.id:1-3](https://repository.radenfatah.aceh.id/1-3).
- Ngoyo, Muhammad Fardan., (2015), “Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs) Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan”, *Sosioreligius* 1, no. 1, 81.
- Batjo Nurdin, dkk., (2016) “Berbelanja di Warung Tetangga”, (Jakarta), 7.
- Osborn, Derek., and Amy Cutter, Farooq Ullah. (2015) “Universal Sustainable Development Goals,” <https://sustainabledevelopment.un.org>.
- Panulu, Sekar., and Meila Riskia Fitri. (2016), “Perkembangan Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia”, *Breafing Paper* 2, no. 2, 4.

- Parmuwito, C., (1997). Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial), 23-24.
- PerMenDesa, PD TT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Pub.L.No.13,1(2020)., 13 oktober.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2013), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 5.
- Reza, Mohammad., (2022). “SDGs Desa dan Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Berkelanjutan, <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-desa-dan-rekonstruksi-paradigma-pembangunan-berkelanjutan>.
- Sabahuddin, (2005) “Ekonomi Islam Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal”, (Bandung: Nuansa), 186.
- Sasuni, Anwar., (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat), h. 150.
- Situmeang, Nurmasari., and Sindy Yulia Putri. (2021), ”Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Pada Kasus Stunting di Indonesia”, *Jurnal PIR* 5, no. 2, 166.
- Sudaryono, (2018). *Metodologi Penelitian*, (Cet. XI; Depok: Raja Grafindo Persada), h. 216.
- Sugiyono, (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), 72.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta), h. 296.
- Sujarweni, V, Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*, (Jilid I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press,.) h. 73-74.
- Surya, Robertta Zulphi., (2019), “Analisis keselarasan SDGs dengan program pembangunan desa Seresam di desa seresam di kabupaten indragiri hulu,” *selodong mayang:jurnal ilmiah badan pembangunan perencanaan daerah di kabupaten indragirihilir*, 79-84,<https://ojes.selodangmayang.com/index.php/babpeda/article/view/130>.
- Susanti, Rina., (2021), “Peran Masyarakat dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih dan Sunitasi”, *Journal of Education, Humaniora and Sosial Sciences (JEHSS)*: 1-5,<https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/535>.

Syafrizal, Situmorang., (2010). *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, (Ed. I; Medan: USU Press), 9.

Usman, Nurdin., (2003), *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: CiputatPress), 30.

Wahab, Abdul., and Solichin. (2008), “Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang), 25.

Widyastuti, Astriana., (2012). “Analisis Hubungan Antara Produktifitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga“*Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 1, no. 2, 2.

Woodbridge Michael, (2015). “From MDGs to SDGs: What are the Sustainable Development Goals?, No.01 (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development: Iclei Briefing Sheet), 1-2.

Zaini, I.F., (2021) “Kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Penanggulangan kemiskinan Masyarakat Desa,” Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 8.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat (1).

L

A

M

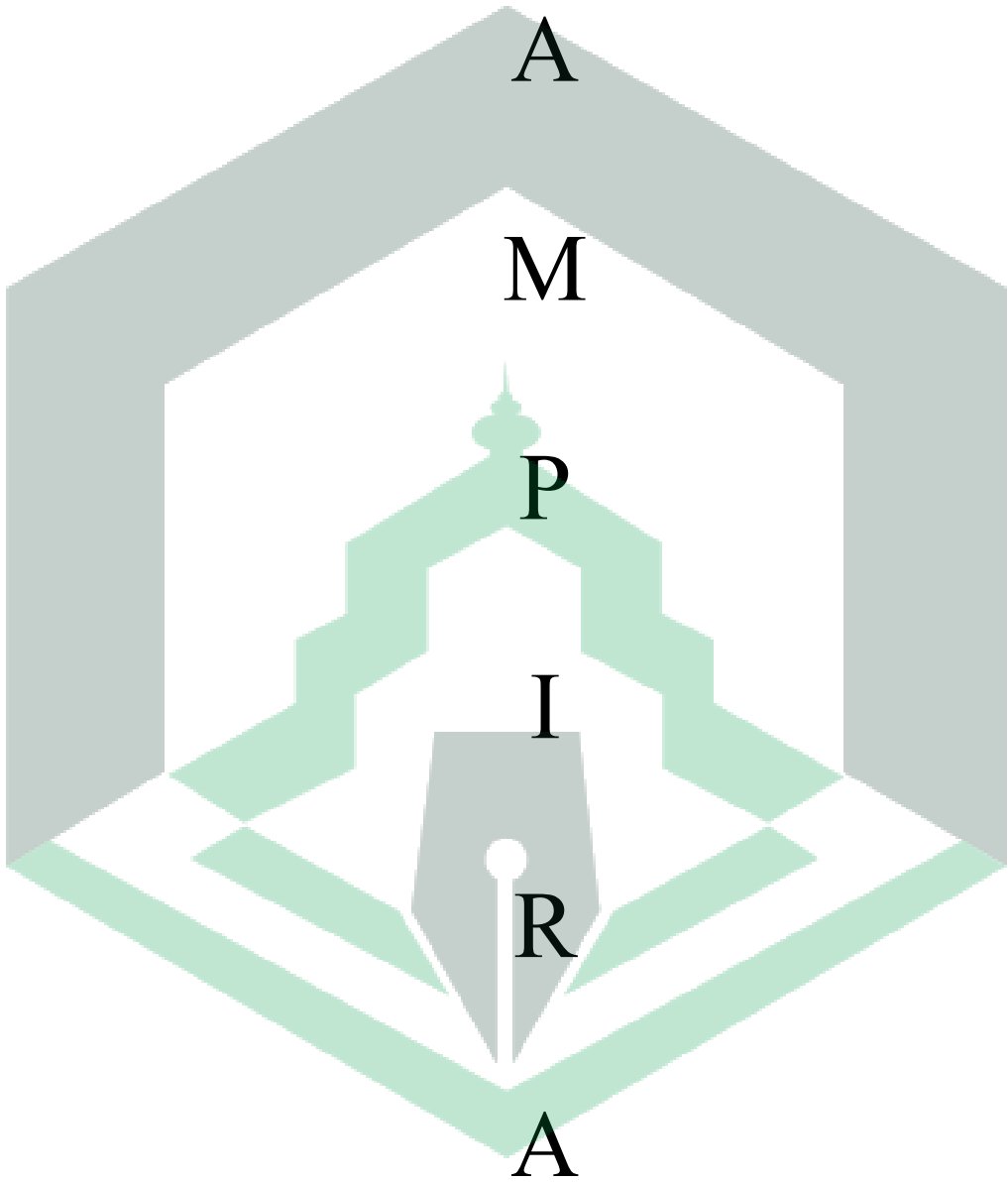
P

I


R

A

N



Lampiran 1: Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Singaperbangsa Kencana Kabupaten Luwu Utara No.27 Telp./Fax 8473-31836 Kode Pos 92961 Siasombi

SURAT KEWAJIBAN PENELITIAN
Nomor : 099/01/1791/2023/DPMPTSP/VIII/2023

Menyatakan : Penerimaan Surat Kelembagaan Penelitian di PERUSAHAAN sesuai lampiran.

Melampirkan :
1. Surat/Surat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kementerian Hukum
2. Surat/Surat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Persewaan Tanah
4. Peraturan Daerah Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Persewaan Tanah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Persewaan Tanah

MEMBUJUKAN

Membuktikan :
Nama : MURJANNA
Nope : 062210848752
Telfone :
Alamat :
Sesuai :
Jenis :
Jumlah :
Persewaan :
Lokasi :
Persewaan :

Dengan kewajiban sebagai berikut:
1. Surat Kelembagaan Penelitian ini berlaku pada tanggal 30 Agustus s.d 31 September 2023.
2. Menyerahkan surat/kelembagaan Penelitian/Undangan yang berlaku.
3. Surat Kelembagaan Penelitian ini berlaku untuk dan digunakan untuk melakukan penelitian pada perusahaan yang telah terdaftar pada daftar perusahaan yang berlaku.

Wakil Kepala Dinas Persewaan Tanah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara yang ditunjuk dan diberi tugas sebagai berikut:
Ditandatangani di : Siasombi
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023


Kepala Dinas Persewaan Tanah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara
Nomor : 13651231199701000

Revisi : Rp. 0,00
No. Seri : 099/01

DPMPTSP
www.dpmptsp.kab.luwu-utara.go.id

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Perangkat Desa :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa terkait dengan program SDGs yang telah berlangsung di desa hoyane?
2. Apakah program/kebijakan pemerintah desa sesuai dengan tujuan SDGs yang telah ditetapkan pemerintah pusat?
3. Bagaimana realisasi program kerja pemerintahan desa hoyane dalam meningkatkan pendapatan masyarakat?
4. Bagaimana bentuk kebijakan pemerinta desa dalam membangun akses perekoomian masyarkat desa?
5. Bagaimana alokasi anggaran desa terkait dengan program SDGs?
6. Apakah dalam pelaksanaan program ini terdapat kendala soal kekurangan dana?
7. Hal apa yang akan pemerintah desa lakukan agar program SDGs dapat terealisasikan dengan baik?

Masyarakat :

1. Bagaimana tanggapan masyarakat (Responden) terhadap program SDGs?
2. Apakah bapak /ibu sudah mengetahui tentang program pembangunan berkelanjutan (SDGs)?
3. Program apa saja yang bapak/ibu ketahui? dan dari mana anda mengetahui program tersebut?
4. Apakah bapak/ibu pernah melihat pemerintah desa melakukan sosialisasi program SDGs di lapangan?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai program SDGs ini? apakah program tersebut dapat membantu perekonomian keluarga?
6. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui tujuan dari program SDGs? Bagaimana cara bapak/ibu menegtahuinya?
7. Apakah terdapat permasalahan lain yang dialami oleh bapak /ibu selain ekonomi?
8. Perubahan/ manfaat apa saja yang dirasakan bapak/ibu setelah dijalankannya program SDGs?
9. Apa harapan bapak/ibu untuk program SDGs kedepannya?

Lampiran 3: Halaman Persetujuan Tim Penguji



Lampiran 4: Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dengan seksama skripsi yang berjudul: Implementasi Sustainable Development Goals dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Terpencil Studi Kasus Desa Hovure Kecamatan Suka Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh:

Nama	Nurjana
NIM	1904310021
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *monografi*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Zainuddin S. S.T., M.Ak

Tanggal: 13 Oktober 2019

Lampiran 5: Nota Dinas Pembimbing

Zainuddin S, S.E., M.Ak.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran

Hal : skripsi an Nurjanna

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Pulopo

Wassalamu 'alaikum wa

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	Nurjanna
Nim	19 0401 0021
Takulmas	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diajukan pada *Ar-Ranajana*

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wa

Perintah


Zainuddin S, S.E., M.Ak.
Tanggal: 13 Oktober 2023

Lampiran 6: Nota Dinas Tim Penguji

Abd. Kadir Arno, S.E.,Sy., M.Si.
Akbar Sabani, S.EI., M.F.
Zainuddin S, S.F., M.Ak.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lampiran :
Hal : 1 (satu) Lembar
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo
Wassalamu'alaikum wr.wb.




Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama :	Nurjanna
Nim :	1904010021
Program Studi :	Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :	Implementasi Sustainable Development Goals dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Terpencil Studi Kasus Desa Hoyare Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Abd. Kadir Arno, S.E.,Sy., M.Si. Penguji I	() Tanggal: 13 Oktober 2023
2. Akbar Sabani, S.EI., M.F. Penguji II	() Tanggal: 13 Oktober 2023
3. Zainuddin S, S.F., M.Ak. Pembimbing/Penguji	() Tanggal: 13 Oktober 2023

Lampiran 7: Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Desa Hoyane



Dokumentasi Jalan Tani



Renovasi Jembatan Desa



Kondisi Jalan ke Desa Hoyane



Wawancara dengan Kepala Dusun



Bantuan Bedah Rumah



Wawancara dengan Ibu Nurbaiti



Kondisi Bangunan Sekolah



Wawancara dengan Bapak Maing (Selaku Masyarakat Desa Hoyane)



Bangunan Pustu



Wawancara dengan Bapak Sukri

RIWAYAT HIDUP



Nurjanna, lahir di Hoyane tanggal 29 Oktober 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan almarhum ayah yang bernama Hamal dan almarhumah Ibu Sarni. Penulis berasal dari lingkungan pegunungan tepatnya di Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2013 di SDN 081 Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara. Kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMPN Hidayatullah Masamba hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di MA Salubanga Suli Barat hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 Penulis terdaftar di salah satu perguruan tinggi negeri Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2023. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dari kedua orang tua serta keluarga yang mendukung dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Sustainable Development Goals dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Terpencil Studi Kasus Desa Hoyane Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara”.